

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM HARIAN SUARA MERDEKA DAN ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PEMBERITAAN KASUS SAMPANG (ALIRAN SUNNI DAN SYIAH) EDISI AGUSTUS – SEPTEMBER 2012**

#### **3.1. Gambaran Umum Tentang Suara Merdeka**

##### **3.1.1 Sejarah berdirinya Harian Suara Merdeka**

Suara Merdeka pertama kali didirikan oleh H. Hetami pada tanggal 11 Februari 1950. Sebelumnya pernah akan diberi nama Mimbar Merdeka, tetapi tidak jadi. Ini dikarenakan huruf dari Mimbar Merdeka berjumlah 13 huruf. Karena dianggap angka sial maka diganti dengan Suara Merdeka yang berjumlah 12 huruf. Koran ini diberi nama Suara Merdeka, pada saat lahir Indonesia baru lima tahun merdeka, sehingga suasana waktu itu masih suasana euphoria kemerdekaan. Bangsa kita juga waktu itu belum banyak memiliki sarana atau media untuk menyalurkan aspirasinya. Maka diterbitkanlah koran ini dengan nama Suara Merdeka, artinya menyuarakan kemerdekaan bangsa ini.

H. Hetami, pendiri Suara Merdeka merupakan tokoh pers serba bisa. Pada awal berdirinya koran ini, ia menjabat sebagai Pimpinan Umum dan Pimpinan Redaksi sekaligus pemilik perusahaan ini dengan memulai karirnya sebagai wartawan sekaligus redaksi. Dia bahkan terjun langsung mencetak dan menjual koran keliling kota Semarang. H.

Hetami pernah mengelola majalah Recths - Hogesscoll di Jakarta, Harian Sinar Baru zaman Jepang di Semarang dan Harian Merdeka di Solo (Dokumen Suara Merdeka, 2013).

### **3.1.2 Perkembangan Harian Suara Merdeka**

Pada mulanya terbit sore hari dari 4 halaman dan dicetak 5.000 eksemplar dengan awalnya 2 wartawan, 2 meja, dan 2 mesin ketik. pada saat ini, Suara Medeka belum mempunyai mesin cetak, sehingga pencetakannya masih menumpang di Harian De Locomotief peninggalan Belanda. Pada awalnya Suara Merdeka mempunyai motto independen, obyektif dan tanpa prasangka. Independen berarti menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan kelompok, obyektif berarti pemberitaannya tidak diwarnai oleh pamrih dan harus seimbang, dan tanpa prasangka berarti wartawan dalam membuat berita harus bebas dari opini pribadi.

Motto ini sejak tahun 2004 tidak lagi dicantumkan di bawah nama Suara Merdeka. Yang dipakai sekarang “Perekat Komunitas Jawa Tengah“. Meskipun tidak dicantumkan lagi bukan berarti hilang begitu saja. Motto tersebut tetap melekat di benak hati sanubari semua karyawan Suara Merdeka Group dan motto tersebut menjadi pegangan semua karyawan di Suara Merdeka. Dipakainya motto baru, dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih dekat dengan pembaca dan mengikuti perkembangan zaman yang makin melesat.

Hingga akhir tahun 2003, jumlah karyawan Suara Merdeka Group 1.300 orang, dengan membawahi 12 perusahaan antara lain :

- 1) Harian Suara Merdeka
- 2) Harian pagi Wawasan
- 3) Tabloid Cempaka Minggu ini
- 4) Tabloid Otspeed
- 5) Suara Merdeka Cybernews
- 6) Radio Suara Sakti
- 7) Radio Track FM
- 8) PT Masscomm Graphy (percetakan)
- 9) PT Masscomm Media (penerbitan)
- 10) PT Merdeka Suryatama
- 11) PT Merdeka Jati Perkasa
- 12) PT Merdeka Wirastama (pengelola kawasan industri Terboyo)

Semua karyawan yang berada dalam Suara Merdeka Group mendapatkan hak asuransi jiwa dan kesehatan, uang transport, kendaraan dinas dan pakaian seragam. Sistem penerimaan karyawan melalui pengumuman resmi terbuka dan usia pensiun yaitu 60 tahun.

Dalam bentuk tercetak, Suara Merdeka beredar di seluruh wilayah JATENG, Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta. Dalam bentuk elektronik (internet) beredar ke seluruh dunia. Pembaca di luar

negeri terbanyak di Amerika dan Negara-negara Eropa Barat. Sedangkan wilayah prioritas pemasaran utama adalah Jawa Tengah dengan oplah 200.000 eksemplar per hari.

### **3.1.3 Visi dan Misi Harian Suara Merdeka**

Visi dari Suara Merdeka adalah menjadi perusahaan media informasi yang handal untuk peningkatan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat dan pengasuh Suara Merdeka Group.

Sedangkan misi Suara Merdeka adalah mandiri, etika, dedikasi, motivasi, dan administrasi yang berarti :

Mandiri : Menyelesaikan pekerjaan / tugas secara professional

Etika : Bertingkah laku atas dasar nilai-nilai

Dedikasi : Bekerja berdasarkan pengabdian kepada perusahaan

Motivasi : Mengembangkan kebiasaan bertumbuh yang terus menerus demi kemajuan

Administrasi : Tertib administrasi dalam segala bidang.

### **3.1.4 Redaksional Harian Suara Merdeka**

Tim redaksi bertugas untuk memilih berita yang paling aktual dan menarik dari berita yang dihimpun oleh wartawan Suara Merdeka yang disebar di daerah – daerah. Setelah berita dipilih kemudian diserahkan ke editor untuk diedit dan diserahkan ke layouter untuk ditata letaknya sebelum cetak. Berita dikirim oleh wartawan melalui

modem komputer langsung ke redaksi. Suara Merdeka juga berlangganan berita dan foto dari kantor Berita Antara, Detikcom, Reuter, AFP, AP, CNN.

Bagian-bagian dan tugas di Departemen Redaksi :

1. Pemimpin Redaksi (PEMRED)

Bertanggungjawab kepada Pemimpin Umum terhadap keseluruhan tugas dan kewajiban Departemen Redaksi.

- a) Memberikan kebijakan umum (arahan) redaksional.
- b) Memimpin Dewan Redaksi.
- c) Memimpin Rapat Koordinasi antara Wakil Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana, Kepala Desk, dan bagian-bagian lain.
- d) Menulis Tajuk Rencana dan Pojok Mewakili Departemen Redaksi untuk kegiatan luar.
- e) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan redaksional.
- f) Bertanggung jawab atas penulisan dan isi tajuk rencana (editorial) yang merupakan opini redaksi (desk opinion).

2. Wakil Pemimpin Redaksi I (WAPEMRED I)

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi :

- a) Mewakili dan menggantikan tugas Pemimpin Redaksi bila Pemred berhalangan.

- b) Mengurus masalah pengembangan produk dan merumuskan kebijakan redaksional.
- c) Mengurus kerja sama dan interaksi dengan pihak luar atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan redaksi.
- d) Melakukan supervisi dan memimpin Rapat Koordinasi Redaktur Pelaksana, Kepala Desk, dan bagian-bagian lain.
- e) Menulis Tajuk Rencana dan Pojok .
- f) Melakukan tugas-tugas administratif.

### 3. Wakil Pemimpin Redaksi II (WAPEMRED II)

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi.

- a) Mewakili dan menggantikan tugas Pemimpin Redaksi bila Pemred dan Wapemred I berhalangan.
- b) Mengurus masalah intern, organisasi, mekanisme kerja, dan pembinaan produktivitas serta pemenuhan kesejahteraan wartawan.
- c) Mengatur peningkatan kualitas wartawan melalui pendidikan intern / ekstern.
- d) Melakukan supervisi dan memimpin Rapat Koordinasi Redpel, Kepala Desk, dan bagian-bagian lain.
- e) Menulis Tajuk Rencana dan Pojok.
- f) Melakukan tugas-tugas administratif.

### 4. Redaktur Senior

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi.

- a) Memberikan masukan dalam strategi pemberitaan dan kebijakan redaksional.
- b) Menyusun dan mengamankan pelaksanaan kode etik wartawan Suara Merdeka.
- c) Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan strategis.
- d) Memberi evaluasi baik bersifat rutin maupun berkala.
- e) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Pemimpin Redaksi.
- f) Menulis Tajuk Rencana dan Pojok.

#### 5. Dewan Redaksi

Dewan Redaksi adalah Dewan atau Forum yang dipimpin oleh Pemimpin Redaksi dengan anggota terdiri, Wakil Pemimpin Redaksi, Redaktur Senior, dan Redaktur Pelaksana. Tugas Dewan Redaksi adalah :

- a) Memberikan masukan mengenai kebijakan redaksional secara umum.
- b) Memberi saran mengenai kebijakan pembinaan wartawan / redaksi.
- c) Memberi saran mengenai liputan.

- d) Membantu melakukan evaluasi terhadap karya Departemen Redaksi.
- e) Membantu mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai-tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi penerbitan yang sudah disepakati.

6. Redaktur Pelaksana (REDPEL)

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi.

- a) Bertanggung jawab dan mengendalikan mekanisme kerja redaksi sehari-hari, serta seluruh isi berita/opini Koran.
- b) Memimpin rapat perencanaan dan pengendalian pemberitaan dengan kepala desk dan kepala biro.
- c) Melaksanakan koordinasi peliputan lintas biro.
- d) Memberikan masukan kepada Pemred / Wapemred soal pemberitaan yang bersifat perlu penanganan khusus.
- e) Melakukan tugas - tugas supervise kepada desk, wartawan dan editor bahasa.
- f) Melaksanakan tugas - tugas administrasi di bidang liputan.
- g) Mengkoordinasi, mengarahkan dan mensuverseri kerja para redaktur atau penanggungjawab rubrik / desk.



- h) Memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada redaktur secara priodik.

#### 7. Koordinator Liputan

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi / Wakil Pemimpin Redaksi

- a) Bertanggung jawab dan mengendalikan seluruh program liputan redaksi baik yang terprogram maupun kejadian di lapangan.
- b) Membuat mekanisme kerja komunikasi antara redaktur dan reporter.
- c) Mengadministrasikan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap reporter.
- d) Melakukan komunikasi setiap saat kepada para redaktur, reporter / wartawan, dan fotografer.
- e) Mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan mengejar sumber berita.
- f) Menyediakan peralatan kerja repoter dan menata keperluan keuangan redaksi: uang perjalanan, uang saku, uang rapat.
- g) Memberikan supervisi dan penilaian kinerja reporter / wartawan secara kuantitas maupun kualitas.

#### 8. Redaktur Malam

Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana :

- a) Memantau perkembangan berita dengan memperhatikan semua fasilitas informasi (TV, internet, Reuters, dan Antara) mulai pukul 22.00-02.00 WIB.
- b) Memberikan masukan ke Redaktur Pelaksana dan Kepala Desk menyangkut perkembangan berita dan berita baru eksklusif di saat kritis (sampai pukul 00.00 WIB).
- c) Berkoordinasi dengan Redaktur Pelaksana menyangkut perkembangan berita eksklusif atau berita baru eksklusif setelah semua unsur desk pulang, dan mengambil keputusan strategis untuk mengganti berita yang sudah tercetak di halaman bila dianggap perlu.
- d) Berkoordinasi dengan petugas piket Layout untuk melaksanakan tugas-tugas penggantian berita.
- e) Memberikan laporan tertulis kepada Redaktur Pelaksana

#### 9. Sekertaris Redaksi

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi / Wakil Pemimpin Redaksi.

- a) Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan di Departemen Redaksi, termasuk surat menyurat internal redaksi.
- b) Melakukan tugas-tugas kompilasi berita yang dibantu pula oleh staf di Bagian Modum dan Internet.

- c) Melakukan pencatatan hasil-hasil rapat harian dan mingguan dan penyebaran ke semua jajaran redaksi.
- d) Mengerjakan penyusunan daftar piket redaksi.
- e) Mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat cheking, rapat final.
- f) Mengerjakan tugas-tugas khusus dari Pemred / Wapemred

#### 10. Kepala Desk

Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana

- a) Bertindak sebagai kapten yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan isi dan penataan halaman masing-masing desk yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Merencanakan program untuk desiknya masing-masing secara harian maupun mingguan (berkala).
- c) Melakukan tugas-tugas kebijakan pemberitaan dengan memperhatikan rubrikasi yang telah disepakati.
- d) Tugas editing dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyeragamkan gaya penulisan seluruh naskah menjadi sama sesuai dengan kebijakan Suara Merdeka.
- e) Tugas rewriting : Menulis *ulang (rewriting)* menulis ulang bahan atau berita dari lapangan dengan penambahan dan

pengayaan data redaktur sehingga berita/tulisan sesuai dengan kebijakan redaksi dan *press claar*.

- f) Memberikan pembinaan, supervisi dan penilaian kinerja anggota desk secara kuantitas maupun kualitas.
- g) Memberikan masukan kepada Redaktur Pelaksana baik yang bersifat strategi pemberitaan maupun *performance* wartawan

#### 11. Staf Desk

Bertanggung jawab kepada Kepala Desk

- a) Membantu Kepala Desk dalam perencanaan sampai pengendalian program untuk desiknya masing-masing
- b) Membantu dan melaksanakan tugas-tugas kebijakan pemberitaan dengan meperhatikan rubrikasi yang telah disepakati
- c) Tugas editing dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menyeragamkan gaya penulisan seluruh naskah menjadi sama sesuai dengan kebijakan Suara Merdeka.
- d) Tugas rewriting : Menulis *ulang (rewriting)* menulis ulang bahan atau berita dari lapangan dengan penambahan dan pengayaan data redaktur sesingga berita/tulisan sesuai dengan kebijakan redaksi dan *press clear*.

- e) Memberikan masukan kepada Kepala Desk tentang strategi pemberitaan dan performance wartawan

## 12. Kepala Biro

Bertanggung jawab kepada Koordinator Liputan

- a) Berkoordinasi intensif dengan Kepala Desk
- b) Merencanakan sendiri atau bersama-sama dengan Kepala Desk
- c) Mengorganisasi operasi wartawan untuk tugas-tugas liputan
- d) Mengendalikan seluruh wartawan dan liputan yang menjadi tugasnya
- e) Melakukan pembagian tugas kepada wartawan di tingkat biro sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi masing-masing
- f) Mengompilasi hasil liputan untuk dikoordinasikan dengan Kepala Desk dan Redaktur Pelaksana
- g) Memberikan masukan kepada Redaktur Pelaksana menyangkut liputan yang memerlukan pendekatan lintas biro.

## 13. Reporter (Wartawan Lapangan)

Bertanggung jawab kepada Kepala Desk dan Kepala Biro

- a) Melakukan tugas-tugas liputan sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan Kepala Desk/Kepala Biro kepadanya.
- b) Melakukan tugas liputan secara kreatif tanpa harus menunggu order dari Kepala Desk/Kepala Biro
- c) Melaporkan hasil liputan kepada Kepala Desk/Kepala Biro
- d) Memenuhi standar minimal jumlah liputan
- e) Memberikan usulan berita kepada redaktur atau atasannya terhadap suatu informasi yang dianggap penting untuk diterbitkan.
- f) Membina dan menjalin lobi dengan sumber-sumber penting di berbagai instansi

#### 14. Bagian Pracetak

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi / Wakil Pemimpin Redaksi

- a) Bersama staf, melakukan perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengendalian seluruh tugas pracetak, jaringan dan pemeliharaan
- b) Memberikan masukan kepada Pemimpin Redaksi mengenai perkembangan teknologi yang menjadi bidangnya untuk pengambilan keputusan.
- c) Berkoordinasi dengan Redaktur Pelaksana pada penyelesaian pekerjaan di tingkat teknis

- d) Berkoordinasi dengan Bagian Tata Wajah menyangkut optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alat (komputer)

#### 15. Kepala Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi

- a) Bersama staf, melakukan tugas-tugas penelitian dan pengembangan berdasarkan kreativitas sendiri maupun order dari Pemred/Wapemred
- b) Melakukan evaluasi seluruh isi koran secara strategis terhadap koran-koran pesaing
- c) Membuat program-program untuk peningkatan kualitas sajian Koran
- d) Memberi masukan kepada Departemen Redaksi untuk pengambilan kebijakan redaksional
- e) Memberikan saran-saran menyangkut pengembangan pemberitaan
- f) Koordinasi aktif dengan R&D perusahaan.

#### 16. Kepala Pusat Dokumentasi (PUSDOK)

Bertanggungjawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi

- a) Bersama staf, mempersiapkan pengadaan buku, kliping, foto dan bahan-bahan dokumentasi lainnya yang dibutuhkan redaksi untuk melengkapi berita atau tulisan yang akan dimuat
- b) Menyediakan data-data, artikel, tulisan yang dibutuhkan untuk sebuah penulisan oleh reporter, redaktur, redaktur pelaksana, dan Pemimpin Perusahaan.
- c) Mencari dan menata buku-buku yang berkaitan dengan tugas dan kerja para wartawan
- d) Mengusulkan suatu berita kepada redaksi bila dalam melaksanakan tugas menemukan data-data atau informasi penting

#### 17. Kepala Tata Wajah

Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana

- a) Bersama staf merencanakan pola tata muka untuk seluruh halaman
- b) Memberikan dummy kepada tiap-tiap penanggung jawab halaman
- c) Berkoordinasi dengan Bagian Iklan untuk perencanaan kapling halaman



- d) Memberikan arahan, masukan menyangkut besar-kecilnya huruf dan melakukan pengawasan atas tugas-tugas artistik halaman
- e) Memberikan arahan menyangkut detail artistik halaman dari sudut tata wajah keseluruhan dengan memperhatikan besar kecilnya judul / kepalaan berita dan foto-foto, ilustrasi, gambar yang harus dimuat
- f) Berkoordinasi dengan Bagian Teknologi Informasi (TI) untuk optimalisasi sumber daya lay-Outer dan peralatan (komputer).

#### 18. Kepala Personalia / Diklat

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi / Wakil Pemimpin Redaksi

- a) Menyusun program peningkatan kualitas SDM wartawan melalui program pendidikan intern maupun ekstern di lembaga-lembaga resmi
- b) Mengevaluasi kinerja wartawan tiap bulan agar terjaga kontinuitasnya
- c) Mengompilasi data potensi seluruh personalia redaksi
- d) Membantu pemenuhan hak dan kesejahteraan wartawan sesuai dengan aturan perusahaan

- e) Memberi masukan menyangkut tentang, perencanaan rekrutmen, penempatan mutasi, pembinaan karier wartawan, dsb.

#### 19. Tata Usaha / Administrasi Redaksi

Bertanggung jawab kepada Pemimpin Redaksi/Wakil Pemimpin Redaksi

- a) Melakukan tugas-tugas administrasi dan keuangan untuk operasional Redaksi, honor wartawan lepas dan tambahan operasional bulanan
- b) Mengoordinasi pengiriman honor untuk penulis luar

#### 20. Tim Bahasa

Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana

- a) Mensupervisi, membantu mengoreksi dan membetulkan naskah dari sisi tata tulis maupun penggunaan bahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
- b) Mengevaluasi dan memberikan saran dan masukan kepada redaksi manakala ditemukan dugaan kesalahan materi pada berita / tulisan
- c) Membuat kesepakatan - kesepakatan internal yang disampaikan ke redaksi.

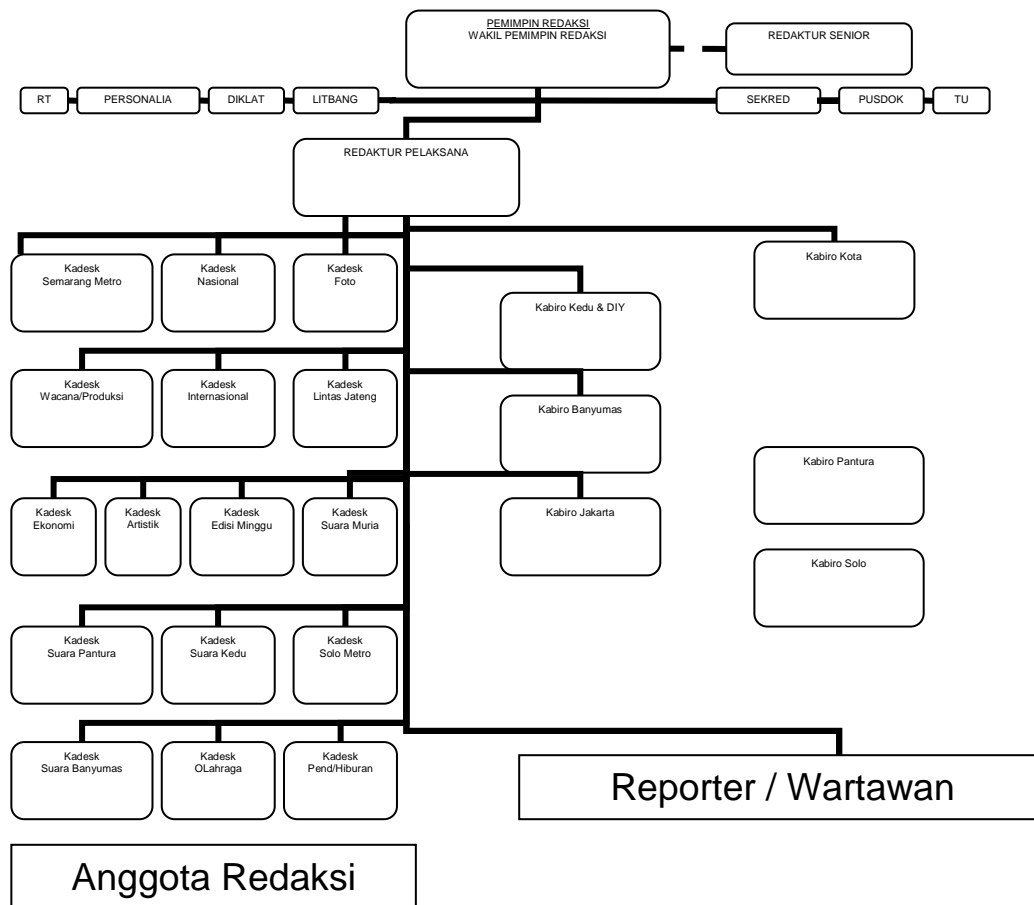
#### 21. Karikatur / ilustrasi

Bertanggung jawab kepada Redaktur Pelaksana

- a) Melakukan tugas-tugas visualisasi isu ke dalam bentuk karikatur berdasarkan kreativitas sendiri
- b) Membuat ilustrasi / gambar sesuai dengan pesanan dari desk
- c) Merancang ilustrasi agar halaman koran terlihat lebih "bervariasi" (Dokumen Suara Merdeka, 2013).

**Gambar 3.1**

**STRUKTUR ORGANISASI  
REDAKSI SUARA MERDEKA**



### 3.2. Data dan Analisis Wacana Pemberitaan Konflik Sampang

Analisis wacana digunakan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian. Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana dalam pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial (Eriyanto, 2006 : 7). Telah diterangkan diawal bahwa pada penelitian terhadap pemberitaan Kasus Sampang yang melibatkan antara aliran Sunni dan Syiah di Madura, penulis menggunakan model analisis Norman Fairclough.

Model analisis yang yang dikemukakan oleh Fairclough ini sering disebut sebagai model perubahan sosial (*sosial change*). Titik perhatian besar dari Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Fairclough ingin menegaskan bahwa wacana media sesungguhnya adalah suatu bidang yang kompleks. Proses yang kompleks itu terjadi di dua sisi. Pertama, dalam ruang redaksi dan institusi media. Kedua, dalam struktur masyarakat dimana kelompok – kelompok dominan dalam masyarakat saling bertarung agar pemaknaan mereka atas suatu peristiwa lebih diterima oleh khalayak (Eriyanto, 2006 : 327 – 328).

Dalam analisis ini, penulis mencoba mengurai makna wacana mengenai pemberitaan Kasus Sampang yang melibatkan antara aliran Sunni dan Syiah di Harian Suara Merdeka yang dilihat dari struktur *teks, discourse practice, sociocultural practice*. Penelitian ini bersifat kualitatif dan bertujuan untuk meneliti secara kritis kontruksi dan makna berita pemberitaan Kasus

Sampang yang melibatkan antara aliran Sunni dan Syiah di Harian Suara Merdeka.

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan pembahasan mengenai gambaran pemberitaan tentang Kasus Sampang antara kaum Sunni dan Syiah. Pemberitaan kasus ini terjadi pada saat bulan Agustus dan ditampilkan oleh Harian Suara Merdeka pada bulan Agustus sampai dengan September tahun 2012. Dari dua bulan edisi tersebut, penulis berhasil mengumpulkan Sembilan berita mengenai Kasus Sampang. Dari Sembilan berita tersebut, penulis mengambil lima berita untuk dianalisis menggunakan analisis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Kelima berita tersebut mewakili analisis kontruksi Harn Suara Merdeka dalam menampilkan berita tentang Kasus Sampang.

### **3.2.1 Analisis Teks**

Berikut ini penulis uraikan data dan analisis pemberitaan mengenai Kasus Sampang di Harian Suara Merdeka :

#### **3.2.1.1 Hari Senin, 27 Agustus 2012 dengan judul “Bentrok Warga Di Sampang, Satu Tewas” yang terdapat di halaman 2**

# Bentrok Warga di Sampang, Satu Tewas

## ● GP Anzor Kutuk Penyerangan

**SAMPANG** - Bentrok antarwarga yang diduga berbeda aliran keagamaan terjadi di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Sampang, Madura, Minggu (26/8) sekitar pukul 11.00.

Akibahnya, seorang warga tewas, sejumlah orang terluka, dan 37 rumah terbakar. Korban Meninggal Hamana (39), warga Karanggayam, Kecamatan Omben, Korban luka-luka, Syaiful (28), Sansul (18), Syaifuddin (20), Hasyim (21), dan Mar Hasbi. Tak hanya itu, Kapolres Omben AKP Aris Dwi (44) juga terluka saat berusaha meleraikan massa yang bentrok. Korban luka dirawat di RSUD Pamekasan.

Kapolda Jatin Iryen Pol Hardiatmoko mengatakan, kesimpulan sementara, kejadian ini merupakan kriminal murni. "Kami akan menindak tegas para pelakunya," katanya.

Peristiwa ini bermula ketika rombongan

siswa dari komunitas Syiah akan kembali ke Bangil. Pasuruan setelah merayakan hari pulihannya dari kelompok Sumi dan dewan.

"Anak-anak ini akan kembali ke Bangil setelah mengunjungi Lebaran," kata Kusum, istri Tajul Muluk, ustadz kelompok Syiah Sampang.

Tak berselang lama, massa ini menyebarkan dan mendanagi rumah siri Tajul Muluk. Rumah ini kemudian terbakar masa yang menyatakan menolak Syiah di Sampang ini. Aksi pembakaran memicu bentrok antara massa Syiah dan Sumi. Massa dari komunitas Syiah Sampang ini ingin melindungi

keluarga Tajul Muluk.

Asas kejadian ini aparat kepolisian dari Polres Sampang dan Polda Jatin diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melecehkan bentrok antarwarga.

Polis meninjau lokasi dari jalan masuk Kecamatan Omben hingga Desa Karanggayam yang menjadi lokasi basis kelompok Islam Syiah di Sampang. Ratusan pengikut Syiah mengungsi ke suatu tempat di Kota Sampang, sedangkan KH Tajul Muluk sendiri diizinkan ke peradilan dengan tuduhan telah melakukan provokasi agama. Hingga sekarang, kondisi kedua desa itu belum kondusif.

Bentrokan antara kelompok ini mengingkari kejadian serupa pada Kamis, 29 Desember 2011. Saat itu, ratusan massa dari Islam Sumi yang dipimpin KH Rais melakukan aksi pembakaran rumah, sekolah, dan musala milik tokoh Islam Syiah Sampang, KH Tajul Muluk, di Dusun Nangkrayang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben. Padahal, KH Rais dengan KH Tajul Muluk sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan.

**Diketahui**

Sementara itu, GP Anzor mengungkap pen-

gegaran warga Syiah ini dan meminta aparat keamanan menindak tegas serta mengedilipelakunya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anzor (PP GP Anzor) Nuzron Wahid menyatakan kejadian ini pasti ada unsur kesengajaan mengadu domba antaragama, terutama keharmonisan antarumat Islam.

"Sumi-Syiah ini berang lama, dan sudah lama ada saling pengertian dan menghormati satu sama lain. Pasti ada pihak lain yang dengan sengaja mengadu domba dan memecah belah Bangsa Indonesia," ujar politikus Partai Golkar, kemari.

Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara Pancasila yang mengedepankan toleransi, prinsip persaudaraan sesama agama Islam (*ukhuwah islamiyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) dan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*).

Memuti dia, sebagai organisasi kependidikan berbasis keagamaan yang mengunggulkan Ahlusunnah wal jamaah (Sumi), GP Anzor akan menggerakkan kelompok Syiah untuk hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. (G14, di-71)

Dalam analisis wacana kritis menggunakan teori yang dikembangkan oleh Norman Fairclough dimensi pertama yang dianalisis adalah teks. Teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Adapun analisis teks berita pertama terkait pemberitaan kasus di Sampang, sebagai berikut :

### **a. Representasi dalam Anak Kalimat**

Aspek ini berhubungan dengan bagaimana seseorang, kelompok, peristiwa dan kegiatan ditampilkan dalam teks, dalam hal ini bahasa yang dipakai. Pada dasarnya pemakaian bahasa dihadapkan pada tingkat kosakata apa yang digunakan dalam menampilkan dan menggambarkan sesuatu. Pemakai bahasa dapat memilih, apakah seseorang, kelompok, atau kegiatan tertentu hendak ditampilkan sebagai sebuah tindakan (*action*) atukah sebagai sebuah peristiwa (*event*).

Analisis representasi dalam anak kalimat dalam berita pertama yang berjudul “Bentrok Warga di Sampang, Satu Tewas”, kosakata yang menunjukkan gambaran suatu set adalah bentrok. Bentrok, diartikan sebagai sebuah peristiwa kriminalitas yang dilakukan antar dua kelompok. Bentrok merupakan aksi cekcok, berselisih yang diakibatkan karena kurangnya komunikasi antar satu sama lain. Dalam Kasus Sampang, pemakaian kata bentrok dalam pemberitaan ini diakibatkan ketidakharmonisan antar aliran keagamaan. Hal ini tertera dalam *lead* berita.

**SAMPANG** - Bentrok antarwarga yang diduga berbeda aliran keagamaan terjadi di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Sampang, Madura, Minggu (26/8) sekitar pukul 11.00.

Pada tingkat tata bahasa, analisis Fairclough memusatkan pada apakah tata bahasa ditampilkan dalam bentuk proses ataukah partisipan. Dalam pemberitaan menampilkan sebuah proses peristiwa bentrokan yang berawal dari penghadangan warga Syiah oleh warga Sunni. Peristiwa ini kemudian berlanjut pada penyerbuan dan pembakaran rumah istri Tajul Muluk. Berita menjelaskan kronologi peristiwa bentrok yang memakan korban jiwa.

"Anak-anak itu akan kembali ke Bangil setelah mengikuti Lebaran," kata Kulsum, istri Tajul Muluk, ustadz kelompok Syiah Sampang.

Tak berselang lama, massa itu menyerbu dan mendatangi rumah istri Tajul Muluk. Rumah itu kemudian dibakar massa yang menyatakan menolak Syiah di Sampang itu. Aksi pembakaran memicu bentrok antara massa Syiah dan Sunni. Massa dari komunitas Syiah Sampang itu ingin melindungi

Pemberitaan ini menggambarkan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh warga Sunni terhadap Warga Syiah di Sampang. Ini

Tiba-tiba mereka diadang puluhan massa dari kelompok Sunni dan diancam.

dapat terlihat dalam kalimat



disini tergambarkan bahwa warga Sunni sebagai pelaku dalam bentrok yang terjadi di Sampang.

#### **b. Representasi dalam kombinasi anak kalimat**

Antara satu anak kalimat dengan anak kalimat yang lain dapat digabungkan sehingga membentuk suatu pengertian yang dapat dimaknai. Gabungan antar anak kalimat akan membentuk koherensi lokal, yakni pengertian yang didapat dari gabungan anak kalimat satu dengan yang lain, sehingga mempunyai arti.

Koherensi anak kalimat dalam pemberitaan ini terdapat dalam pertengahan berita.

. Ratusan pengikut  
Syiah mengungsi ke suatu tempat di Kota  
Sampang, sedangkan KH Tajul Muluk  
sendiri diajukan ke peradilan dengan  
tuduhan telah melakukan penodaan agama.  
Hingga semalam, kondisi kedua desa itu  
belum kondusif.

Koherensi ini menunjukkan perpanjangan, dimana anak kalimat yang satu merupakan perpanjangan dari anak kalimat yang lain. Kalimat kedua memperpanjang kalimat pertama, yang menerangkan bahwa ratusan pengikut Syiah mengungsi ke kota. Arti penghubung “sedangkan” adalah untuk menandai perlawanan. Penggabungan dua fakta yang saling terpisah. Kalimat kedua merupakan lawan dari kalimat pertama.

Pada kalimat kedua, Tajul Muluk yang merupakan pemimpin Syiah di Sampang, tidak ikut mengungsi ke kota. Dia dibawa ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan tuduhan melakukan penodaan agama.

.. Saat itu, ratusan massa dari Islam Sunni yang dipimpin KH Rois melakukan aksi pembakaran rumah, sekolah, dan mushala milik tokoh Islam Syiah Sampang, KH Tajul Muluk, di Dusun Nangkrenang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben. Padahal, Kiai Rois dengan Kiai Tajul Muluk sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan.

Kalimat dalam berita diatas juga menerangkan koherensi perpanjangan. Perpanjangan dalam berita ini menggunakan kata hubung “padahal”. “Padahal” merupakan kata sambung untuk menunjukkan pertentangan antara bagian – bagian yang dirangkai. Pertentangan kalimat ini menjelaskan bahwa Kiai Rois dan Kiai Tajul Muluk merupakan saudara sekandung. Namun diantara keduanya terjadi perselisihan. Perselisihan ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan pribadi, tetapi telah masuk dalam kelompok aliran Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Hal ini dikarenakan mereka berdua adalah pemimpin dari masing – masing kelompok tersebut.

### c. Representasi dalam rangkaian anak kalimat

Aspek ini berhubungan dengan bagaimana dua kalimat atau lebih disusun dan dirangkai. Representasi ini berhubungan dengan

bagaimana dalam kalimat yang lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Salah satu aspek yang penting adalah apakah partisipan dianggap mandiri atau ditampilkan memberikan reaksi dalam teks berita.

**Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko mengatakan, kesimpulan sementara, kejadian itu merupakan kriminal murni. "Kami akan menindak tegas para pelakunya," katanya.**

Dalam pemberitaan ini, pernyataan Kapolda Jatim ditampilkan dengan cara mengutip secara langsung apa yang dikatakan. Disini, Irjen Pol Hadiatmo berperan sebagai aparat kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat. Dia hanya melihat bentrok ini sebagai kriminalitas biasa, bukan terkait isu SARA. Hal ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh GP Ansor yang mengutuk penyerangan terhadap warga Syiah.

#### **GP Ansor Kutuk Penyerangan**

Wartawan juga menegaskan pernyataan Ketua Umum Pusat Pemuda Ansor. Pengutipan ini ditulis dengan cara meringkas inti yang disampaikan. Wartawan tidak menulis dengan langsung apa yang disampaikan oleh PP GP Ansor.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) Nusron Wahid menyakini kejadian ini pasti ada unsur kesengajaan mengadu domba antarelemen bangsa, terutama keharmonisan antarumat Islam.

Berita ini juga menampilkan pendapat dari politikus Partai Golkar. Wartawan mengutip secara langsung apa yang disampaikannya tanpa menyingkat dan meringkas.

"Sunni-Syiah itu barang lama, dan sudah lama ada saling pengertian dan menghormati satu sama lain. Pasti ada pihak lain yang dengan sengaja mengadu domba dan memecah belah Bangsa Indonesia," ujar politikus Partai Golkar, kemarin.

Terdapat perbedaan dalam penulisan pernyataan - pernyataan partisipan. Umumnya Koran yang tidak suka dengan sebuah pernyataan akan ditampilkan dengan cara meringkas inti dari pernyataan tersebut.

#### d. Relasi

Relasi berhubungan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media disini dipandang sebagai arena sosial, dimana semua kelompok, golongan, dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan versi pendapat dan gagasan.

Dalam berita pertama yang berjudul “Bentrok Warga di Sampang, Satu Tewas”, menampilkan partisipan publik yaitu aparat kepolisian dan politikus. Aparat kepolisian diwakili oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmo. Sedangkan dari politikus diwakili Partai Golkar yaitu Nusron Wahid yang juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Ansor.

Media massa membutuhkan polisi untuk melengkapi data sebuah berita. Bagi pihak kepolisian, media massa dinilai sebagai armada efektif yang mampu mengantarkan seluruh informasi yang hendak polisi sampaikan kepada masyarakat. Media massa juga dapat membantu dalam proses penegakan hukum.

Hubungan Nusron Wahid selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Ansor mewakili dari organisasi Islam dalam menanggapi Kasus Sampang. Kasus Sampang yang melibatkan dua aliran dalam Islam perlu mendapat perhatian khusus bagi umat Islam. Ini merupakan cerminan kehidupan umat Islam yang seharusnya mengedepankan *Ukhuwah Islaimyah* dan hidup rukun.

Keterkaitan Nusron Wahid sebagai politikus Golkar mampu menjangkau khalayak dengan bantuan media massa. Media massa mampu mengkontruksi image seorang politikus agar dapat mempengaruhi masyarakat.

### e. Identitas

Aspek identitas melihat bagaimana wartawan ditampilkan dan dikonstruksi dalam teks pemberitaan. Wartawan menempatkan dan mengidentifikasi dirinya dengan masalah atau kelompok sosial yang terlibat.

**Peristiwa itu bermula ketika rombongan**

**siswa dari komunitas Syiah akan kembali ke Bangil, Pasuruan setelah merayakan Idul Fitri di Sampang. Tiba-tiba mereka diadang puluhan massa dari kelompok Sunni dan diancam.**

Wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai korban dalam bentrokan yang terjadi. Wartawan menjelaskan kronologi peristiwa seolah – olah, dia berada dalam bentrokan tersebut dan menjadi salah satu korban.

3.2.1.2 Hari Selasa, 28 Agustus 2012 halaman 2 Judul berita :

### Penyerangan Pemukiman Syiah Sistemis

# Penyerangan Permukiman Syiah Sistematis

**JAKARTA** - Insiden di Sampang dinilai bukan merupakan kerusuhan, melainkan penyerangan yang direncanakan secara sistematis terhadap warga Syiah. Peristiwa itu menunjukkan Polri gagal menjaga keamanan dan melindungi warga negara.

Menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, terlanjarnya kejadian serupa karena kekerasan terus diabaikan tanpa penegakan hukum yang tegas. Peristiwa Sampang merupakan potret buruk tentang jaminan kebebasan warga untuk beragama/bertekad.

"Presiden SBV harus menyikapi kekerasan ini sebagai kondisi darurat kebebasan beragama. Yang tidak cukup diatasi dengan ceramah dan seruan untuk bertoleransi. Tindakan nyata Presiden yang

bisa menghentikan persekusi atas mereka yang berbeda ini," kata dia dalam siaran pers, kemarin.

Menyeri Agama Suryadharma Ali mengungkap tindak kekerasan terhadap santri penganut paham Syiah tersebut. Menurutnya, segala kekerasan atas nama apa pun, termasuk atas nama agama, tidak dapat dibenarkan.

"Ajaran agama-agama adalah kedamaian, tidak mengajarkan kekerasan. Perbedaan pendapat dalam beragama memang terjadi, seperti perbedaan mazhab Syiah dan Sunni, namun hal itu harus diselesaikan dengan jalan dialog yang konstruktif dan penuh persaudaraan," katanya.

#### Tindakan Represif

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr Asrorun Ni'am Sholeh meminta

pemerintah segera menuntaskan konflik di Sampang, dengan mengurai masalah dari akarinya. KPAI juga mengingatkan pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang ikut menderita akibat insiden tersebut.

Indonesian Police Watch meminta pihak terkait segera mengusut tuntas kasus tersebut. IPW berharap agar Pemprov Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Polri bertindak sebagai mediator. Ketiga lembaga tersebut diminta menangani pihak yang bersengketa untuk dialog.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta pemerintah bertindak tegas dengan segera membawa para pelaku ke meja hijau. Bahkan, perlu tindakan represif supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. (F4.D3.H28.D19-59)

Adapun analisis teks berita kedua terkait pemberitaan kasus di Sampang, sebagai berikut :

**a. Representasi dalam anak kalimat**

Analisis Representasi dalam anak kalimat dalam berita kedua yang berjudul “Penyerangan Pemukiman Syiah Sistemis”. Pemakaian kosakata “Penyerangan” digunakan untuk menampilkan suatu tindakan dengan cara menyerang dan menyerbu. Penyerangan ini terjadi di pemukiman warga Syiah. Wartawan memilih kata “Penyerangan” untuk menggambarkan suatu tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan yang bersifat fisik.

## Penyerangan Permukiman Syiah Sistematis

Dalam paragraf pertama, dijelaskan bahwa insiden di Sampang dinilai bukan kerusuhan, melainkan penyerangan yang direncanakan secara sistemis terhadap warga Syiah. Wartawan lebih memilih kata “penyerangan” dikarenakan pelaku hanya terdiri dari satu kelompok dan kelompok yang lain hanya merupakan korban. Mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti dalam peristiwa ini. Hal ini berbeda dengan pemakaian “kerusuhan”, “kerusahan” diartikan sebagai sebuah kekacauan, rusuh (tidak aman) yang dilakukan oleh kedua belah pihak.



**JAKARTA-** Insiden di Sampang dinilai bukan merupakan kerusuhan, melainkan penyerangan yang direncanakan secara sistematis terhadap warga Syiah. Peristiwa itu menunjukkan Polri gagal menjaga keamanan dan melindungi warga negara.

Berita kedua menampilkan bahasa dalam bentuk partisipan. Wartawan menggunakan kata “dinilai” dalam penulisan berita. Kata “dinilai” merupakan sebuah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah pendapat. “Dinilai” diartikan sebagai sebuah tanggapan dalam melihat peristiwa penyerangan yang terjadi di Sampang Madura.

Berita ini menampilkan banyak pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh masyarakat. Dalam paragraf kedua ditampilkan partisipasi dari Ketua Badan Pengurus Setara Istitute Hendardi, yang berpendapat bahwa peristiwa kekerasan yang terus dibiarkan tanpa penegakan hukum akan terulang kembali.

Selain itu, Hendardi juga menyarankan kepada presiden SBY agar tidak hanya memberikan ceramah dan seruan dalam hal toleransi beragama. Namun Presiden harus menghentikan kekerasan tersebut.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr Asrorun Ni'am Sholeh menekankan kepada pihak pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap anak – anak akibat peristiwa ini.

### b. Representasi dalam kombinasi anak kalimat

Representasi dalam kombinasi anak kalimat yang terdapat dalam berita kedua yaitu koherensi perpanjangan.

"Ajaran agama-agama adalah kedamaian, tidak mengajarkan kekerasan. Perbedaan pendapat dalam beragama memang terjadi, seperti perbedaan mazhab Syiah dan Sunni, namun hal itu harus diselesaikan dengan jalan dialog yang konstruktif dan penuh persaudaraan," katanya.

Penggunaan kata “namun” sebagai kata penghubung dalam penulisan berita diartikan sebagai penghubung antar kalimat untuk menandai perlawanan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta pemerintah bertindak tegas dengan segera membawa para pelaku ke meja hijau. Bahkan, perlu tindakan represif supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. (F4,D3,H28,D19-59)

Kata “bahkan” digunakan untuk menghubungkan bagian kalimat dengan kalimat yang lain untuk menguatkan kalimat yang lain. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meminta pemerintah untuk bersifat tegas. Dia memperkuat kalimatnya dengan penghubung kata “bahkan” agar pemerintah melakukan tindakan represif supaya kasus tersebut tidak terulang kembali.

### c. Representasi dalam rangkaian anak kalimat

Berita yang berjudul “Penyerangan Pemukiman Syiah Sistemis” merupakan sebuah berita yang bersifat partisipan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pendapat para tokoh dalam menanggapi kasus ini. Para partisipan ditampilkan memberikan reaksi dalam teks berita.

Menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendaridi, terulangnya kejadian serupa karena kekerasan terus dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas. Peristiwa Sampang merupakan potret buruk tentang jaminan kebebasan warga untuk beragama/berkeyakinan.

Pernyataan partisipan ini ditampilkan dengan cara mengutip apa yang dikatakan oleh Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendaridi. Diparagraf berikutnya reaksi partisipan dikutip secara langsung tanpa meringkas inti dari pernyataan tersebut.

Selain itu, reaksi juga dikemukakan oleh Suryadharma Ali selaku Menteri Agama. Pernyataannya dalam berita juga ditulis secara langsung. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr. Asrorun Ni’am Sholeh memberikan reaksi tentang pentingnya pemerintah dalam memperhatikan perlindungan anak akibat penyerangan di Sampang.

#### **d. Relasi**

Relasi menampilkan pola hubungan partisipan dalam media. Media dipandang sebagai suatu tempat di mana masing – masing partisipan berusaha menyampaikan pendapat, gagasan dan idenya agar lebih diterima oleh publik.

Dalam berita kedua banyak menampilkan pernyataan partisipan yang berasal berbagai elemen masyarakat. Para partisipan ini, menanggapi tentang penyerangan yang dilakukan warga Sunni terhadap warga Syiah. Pada paragraf pertama wartawan beranggapan, penyerangan ini menunjukkan bahwa Polri gagal dalam menjaga keamanan dan melindungi warga. Pihak kepolisian dinilai kurang tanggap dalam menyikapi masalah Kasus Sampang yang sudah pernah terjadi.

**Menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendaridi, terulangnya kejadian serupa karena kekerasan terus dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas. Peristiwa Sampang merupakan potret buruk tentang jaminan kebebasan warga untuk beragama/berkeyakinan.**

Dalam data berita diatas terlihat partisipan sebagai khalayak media. Badan Pengurus khalayak Setara Institute sebagai salah satu perwakilan masyarakat dalam menanggapi Kasus Sampang ini. Media menampilkan pernyataan khalayak media untuk mempengaruhi masyarakat dalam menanggapi Kasus ini. Hendaridi juga menghimbau

kepada presiden SBY agar menyikapi kekerasan ini sebagai kondisi darurat kebebasan beragama.

Media massa sangat berpengaruh terhadap pemerintahan. Masyarakat dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah melalui media massa. Menteri Agama Suryadharma Ali juga memberi tanggapan terhadap kerusuhan ini. Sebagai perwakilan pemerintah dalam bidang keagamaan, Suryadharma Ali menyatakan bahwa agama tidak mengajarkan kekerasan. Hubungan media dengan pemerintahan terlihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang meminta pemerintah bertindak tegas agar tidak terjadi kejadian serupa.

Media tidak hanya berhubungan dengan masyarakat yang telah dewasa. Media juga peduli dengan perkembangan anak – anak. Dalam berita kedua ini, diterangkan partisipan oleh Wakil Ketua Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr Asrorun Ni’am Sholeh yang meminta pemerintah memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak – anak akibat konflik di Sampang.

#### **e. Identitas**

Dalam paragraf pertama wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat yang menanggapi Kasus Sampang. Wartawan menilai kasus ini sebagai sebuah penyerangan yang direncanakan

secara sistemis. Sementara dalam paragraf kedua hingga selesai, wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai khalayak media.

Berita kedua ini, menampilkan media sebagai tempat demokratisasi untuk menyampaikan pendapat terhadap suatu masalah. Pemberitaan ini mewakili elemen masyarakat dalam menanggapi kasus kekerasan yang melibatkan dua aliran keagamaan yang berbeda. Masyarakat mengharap pemerintah menanggapi dengan tegas kasus ini dan tidak lupa memperhatikan nasib anak – anak akibat insiden tersebut.

### 3.2.1.3 Hari Selasa, 28 Agustus 2012 halaman 2, dengan judul : Delapan

#### Ditangkap, Ratusan Mengungsi

#### ● Kerusuhan di Sampang

**SAMPANG** - Polisi menangkap delapan orang yang diduga terlibat bentrokan antara massa Syiah dan Sunni di Kabupaten Sampang, Madura, Jatim.

Polisi masih memburu tiga provokator yang menyulut bentrokan yang mengakibatkan dua orang tewas dan puluhan rumah dibakar itu.

Di sisi lain, ratusan warga Syiah yang rumahnya dibakar massa mengungsi ke tempat aman. Mereka dikawal ketat aparat Brimob bersenjata lengkap. Selain itu, ratusan personel Polda Jatim dikerahkan ke Sampang. Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang kemarin mengunjungi lokasi kejadian berjanji mengusut tuntas kasus kekerasan berbau SARA itu.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami akan menindak tegas siapa pun pelakunya," kata Timur.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, tujuh dari delapan orang itu ditangkap pada Minggu malam. Satu lainnya ditangkap pada Senin pagi.

Dia menepis anggapan bahwa kekerasan kedua kelompok itu bermuatan politik, apalagi dikait-kaitkan dengan Pilkada Sampang pada Desember 2012 dan Pilgub Jatim akhir Agustus 2013.

"Ini murni masalah kriminal," ujarnya.

Soekarwo mengutarakan, pihaknya tidak bisa melarang ajaran Syiah berkembang di Jatim. Namun demikian, diingatkan agar kelompok Syiah tidak membuat syiar yang menyinggung perasaan dan keyakinan kelompok lain.

Orang pertama di Jatim itu tak sepatutnya dengan usul relokasi pengikut Syiah di Sampang ke luar Madura. Pada kondisi darurat seperti sekarang, tambahnya, langkah taktis yang dilakukan adalah mengevakuasi kelompok minoritas untuk sementara waktu ke lapangan tenis *indoor* di Kota Sampang.

Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang juga berusaha menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan mereka selama berada di lokasi pengungsian sementara.

"Saya telah menghubungi Mendagri

Gamawan Fauzi untuk minta izin menggunakan dana bencana untuk menangani pengungsian. Kami tidak ingin merelokasi mereka keluar dari Sampang. Ini kan negara Pancasila, tidak bisa kelompok minoritas diusir seperti itu. Harus dicari solusi terbaik," ingatnya.

Bukan sekali ini saja warga Islam Syiah mengungsi ke Kota Sampang setelah terjadi aksi kekerasan. Pada akhir Desember 2011 lalu juga terjadi hal serupa.

#### Tegas dan Adil

Di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran penegak hukum bertindak tegas dan adil dalam kasus itu. Dalam keterangan pers sesuai rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Senin (27/8) siang, SBY meminta jajaran pemerintah, terutama aparat keamanan, mengambil langkah yang cepat dan tepat sehingga kasus kekerasan terhadap umat beragama seperti di Sampang tidak terulang.

Penegak hukum diminta bertindak secara tegas dan adil, karena jika tidak, akan memancing hal serupa di masa depan. "Tegas dan adil. Kalau kesalahan berat hukumannya juga berat, maka itu akan baik bagi negara kita," kata Presiden.

Sebelum menggelar rapat, SBY melakukan komunikasi via telepon dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Presiden meminta Pemprov Jatim membantu korban dari kedua belah pihak secara adil.

SBY juga mengkritik kinerja intelijen, baik intelijen kepolisian maupun intelijen TNI.

"Kalau intelijen bekerja dengan benar dan baik, maka antisipasi akan dapat dilakukan dengan baik dan terdeteksi keganjilan yang ada di wilayah itu, apalagi mengingat kejadian ini bukan yang pertama kali," tandasnya. "Dua tahun terjadi dua kasus sama, padahal sebelumnya tidak pernah," kata SBY. (G14, A20-59)

Adapun analisis teks berita ketiga terkait pemberitaan kasus di Sampang, sebagai berikut :

**a. Representasi dalam Anak Kalimat**

**SAMPANG** - Polisi menangkap delapan orang yang diduga terlibat bentrokan antara massa Syiah dan Sunni di Kabupaten Sampang, Madura, Jatim.

Representasi anak kalimat dalam berita ketiga, wartawan memakai istilah bentrokan dalam memaknai kasus yang terjadi di Sampang. Bentrokan, diartikan sebagai sebuah peristiwa kriminalitas yang dilakukan antar dua kelompok. Dalam berita pertama, wartawan juga menggunakan kata bentrok. Bentrok dipakai untuk menjelaskan aksi tersangka dalam Kasus Sampang yang melibatkan antara Sunni dan Syiah.

Bentrokan digambarkan sebagai suatu peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa. Akibat bentrokan ini, dua orang tewas dan puluhan rumah dibakar. Para korban bentrokan yaitu warga Syiah dikawal ketat oleh aparat bersenjata menuju tempat yang lebih aman.

Berita ketiga ini, menerangkan bahwa aparat kepolisian akan mengusut tuntas kekerasan yang berbau SARA. Pihak kepolisian juga menolak bahwa konflik ini bermuatan politik yang dikait – kaitkan dengan Pilkada Sampang. Peristiwa bentrok dipicu oleh kelompok



Syah yang masih menyebarkan dan menyinggung perasaan kelompok Sunni.

#### **b. Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat**

Kombinasi anak kalimat menampilkan hubungan yang saling berhubungan antara dua fakta. Dua fakta digabungkan dengan menggunakan kata penghubung. Berita ketiga terdapat penggabungan fakta – fakta berbeda yang dirangkai membentuk suatu realitas. Penggabungan digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi.

**Polisi masih memburu tiga provokator yang menyulut bentrokan yang mengakibatkan dua orang tewas dan puluhan rumah dibakar itu.**

**Di sisi lain, ratusan warga Syiah yang rumahnya dibakar massa mengungsi ke tempat aman. Mereka dikawal ketat aparat Brimob bersenjata lengkap. Selain itu, ratusan personel Polda Jatim dikerahkan ke Sampang. Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang kemarin mengunjungi lokasi kejadian berjanji mengusut tuntas kasus kekerasan berbau SARA itu.**

Penggalan berita diatas menjelaskan tentang kinerja kepolisian yang memburu tiga provokator yang mengakibatkan bentrokan terjadi. Setelah fakta diatas dipaparkan, wartawan memilih kata “di sisi lain” untuk menambahi fakta yang telah ada. Fakta yang digunakan merupakan sebuah perpanjangan yang bersifat kontras. Fakta yang pertama tidak berkaitan langsung dengan fakta kedua. Namun fakta

kedua berhubungan dengan nasib ratusan warga Syiah yang diungsikan ke tempat yang lebih aman.

Kata “selain itu” juga digunakan sebagai perpanjangan yang bersifat kontras. Dalam berita ketiga, “selain itu” memperpanjang fakta berikutnya yang menerangkan pengerahan personel Polda Jatim ke Sampang.

### c. Representasi dalam rangkaian anak kalimat

Wartawan menampilkan pendapat partisipan dengan mengutip secara langsung dan meringkas inti dari apa yang dibicarakan.

**Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, tujuh dari delapan orang itu ditangkap pada Minggu malam. Satu lainnya ditangkap pada Senin pagi.**

**Dia menepis anggapan bahwa kekerasan kedua kelompok itu bermuatan politik, apalagi dikait-kaitkan dengan Pilkada Sampang pada Desember 2012 dan Pilgub Jatim akhir Agustus 2013.**

**"Ini murni masalah kriminal," ujarnya.**

**Soekarwo mengutarakan, pihaknya tidak bisa melarang ajaran Syiah berkembang di Jatim. Namun demikian, di mengingatkan agar kelompok Syiah tidak membuat syiar yang menyinggung perasaan dan keyakinan kelompok lain.**

Paragraf pertama berita diatas memperlihatkan pendapat partisipan yang ditulis dengan cara meringkas inti yang dibicarakan. Gubernur Jatim Soekarwo menerangkan penangkapan 7 pelaku kerusuhan di Sampang. Penampilan pendapat berikutnya, dikutip secara langsung yang menyatakan bahwa peristiwa kerusuhan di Sampang adalah

murni kriminalitas. Hal ini mempertegas pendapat sebelumnya bahwa kekerasan kedua kelompok tersebut tidak bermuatan politik. Apalagi dikait – kaitkan dengan Pilkada pada Desember 2012.

Dalam berita ini, rangkaian kalimat menampilkan suatu informasi yang menerangkan ringkasan tema dari Kasus Sampang. Paragraf pertama dan kedua saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lain. Dari rangkaian penulisan berita diatas, Gubernur Jatim Soekarwo ditempatkan sebagai si pembuat pernyataan. Pengutipan secara langsung dalam penulisan pernyataan partisipan, menampilkan pendapat partisipan sebagai ide yang dominan.

Berita ketiga ini juga menampilkan pendapat Presiden SBY dalam menanggapi Kasus Sampang. Pernyataan Presiden ditampilkan dalam bentuk ringkasan inti. Presiden SBY meminta agar hukum bertindak tegas dan adil dalam penyelesaian kasus ini. Pernyataan presiden tersebut, dipertegas wartawan dengan megutip secara langsung.

**Penegak hukum diminta bertindak secara tegas dan adil, karena jika tidak, akan memancing hal serupa di masa depan. "Tegas dan adil. Kalau kesalahan berat hukumannya juga berat, maka itu akan baik bagi negara kita," kata Presiden.**

**d. Relasi**

Dalam berita ketiga, media membangun relasi dengan pihak pemerintahan. Hal ini terbukti penampilan para partisipan berasal dari pihak pemerintahan yaitu Presiden SBY dan Gubernur Jatim Soekarwo. Disini, pihak pemerintah menyampaikan pendapat yang diwakili oleh kedua tokoh. Pemerintah berupaya memberikan tanggapan terhadap kasus yang sedang terjadi agar masyarakat tidak kebingungan dalam memahami kasus yang berbau SARA ini.

Melalui media massa, hubungan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Media digunakan pemerintah dalam menanggapi setiap persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Melalui media juga, pemerintah dapat mengintruksikan apa saja yang seharusnya dilakukan masyarakat dalam menjalankan peraturan – peraturan pemerintah. Pemerintah juga merupakan narasumber bagi wartawan dalam mencari informasi guna memperlengkap data – data yang diperlukan dalam sebuah pemberitaan.

**e. Identitas**

Berita ketiga yang berjudul Delapan Ditangkap, Ratusan Mengungsi mengidentifikasi wartawan sebagai pihak pemerintahan yaitu pemprov Jatim dan Pemkab Sampang dalam menanggulangi korban dari Kasus Sampang. Pemerintah telah menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan korban selama berada dilokasi pengungsian.

Pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap permasalahan rakyat. Pemerintah berkewajiban memperhatikan apa saja yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara warga Sunni dan Syiah yang berada di Sampang.

### 3.2.1.4 Hari Rabu, 29 Agustus 2012 halaman 11 dengan judul : “Dewan HAM akan Bahas Kekerasan Sampang”

29 Agustus 2012	Dewan HAM Akan Bahas Kekerasan Sampang
<p>JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Fithal Kasim, meminta pemerintah bertindak tegas dalam kasus kekerasan yang menewaskan dua orang warga pengantut Syiah di Sampang, Minggu (27/8).</p>	<p>yang akurat dan menyeluruh tentang perkembangan penyidikan. Hal itu agar masyarakat terhindar dari desas-desus yang menimbulkan rasa tidak aman dan menimbulkan keakutuan," tambah Fithal.</p>
<p>Menurutnya, tragedi kekerasan di Desa Kanggayan, Orben, Kabupaten Sampang Jawa Timur, menjadi perhatian internasional. Kasus tersebut akan dibahas di sidang dewan HAM internasional September nanti.</p>	<p><b>Persalinan Keluarga</b></p>
<p>"Dewan HAM internasional juga akan menagih keseriusan pemerintah dalam hal kebebasan beragama," katanya di Jakarta, Selasa (28/8) kemarin.</p>	<p>Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali kembali menegaskan bahwa peristiwa bentakan di Sampang, Madura sama sekali bukan persoalan perbedaan paham agama, antara Sunni dan Syiah. Peristiwa ini sebenarnya hanyalah perselisihan antara dua keluarga yaitu keluarga Tajul Muluk dan keluarga Ros. Perselisihan itu merembet sampai melibatkan para pengikutnya.</p>
<p>Fithal mengimbau pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif untuk menciptakan keharmonisan beragama, agar tercipta toleransi. Masyarakat hendaknya tidak terpancing informasi yang menyebarkan dalam keadilan tersebut. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan di lingkungan masing-masing.</p>	<p>"Makanya saya minta semua pihak memahaminya dulu ini persoalannya. Jangan lalu main berkomentar dan lalu mudah menyalahkan saja. Jadi ini bukan masalah perselisihan paham antara Sunni dan Syiah," katanya di Jakarta.</p>
<p>"Pemerintah harus menyiapkan informasi</p>	<p>Memurut dia, solusi yang tepat untuk permasalahan ini adalah rekonsiliasi keluarga dan warga. Dengan cara ini maka yang dilakukan adalah</p>
	<p>mengedepankan kekeluargaan dan persaudaraan. Walaupun yang sifatnya pelanggaran pidana tetap harus diselesaikan melalui jalur hukum.</p>
	<p>Sementara itu, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan lemahnya intelijen, menggejutkan dan sangat disayangkan. Sebab hal itu berarti masalahnya sangat serius dan negara dalam keadaan bahaya.</p>
	<p>"Kalau sampai sinyalemen yang disampaikan Presiden tersebut benar, maka kondisinya sudah dalam posisi yang membahayakan pemerintahan," kata anggota Komisi DPR Tajib Kurniolo.</p>
	<p>Lemahnya intelijen tentu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik pembangunan. Hal ini juga akan mengakibatkan keresahan dan menimbulkan dampak pada masyarakat.</p>
	<p>"Sebab, dukungan data dari intelijen tidak akurat, sering kecondongan dan tidak ada koordinasi. Alan, bisa saja sajian data dari intelijen ada, namun tidak cepat dikordinasikan," ujarnya. (D3.F4.H28.J22-25.77)</p>

Adapun analisis teks berita keempat terkait pemberitaan kasus di Sampang, sebagai berikut :

**a. Representasi dalam anak kalimat**

Berita keempat merepresentasi kalimat dalam paragraf pertama yang menjadi *lead* berita. Dalam *lead* berita terdapat kata “kekerasan” yang digunakan dalam menggambarkan sebuah tindakan yang merugikan orang lain. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.

**JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim, meminta pemerintah bertindak tegas dalam kasus kekerasan yang menewaskan dua orang warga penganut Syiah di Sampang, Minggu (27/8).**

Dalam berita keempat, kata “kekerasan” digunakan untuk menampilkan peristiwa pembakaran pemukiman Syiah yang menewaskan 2 orang warga Syiah di Sampang. Peristiwa kekerasan di Sampang Madura melibatkan dua golongan anggota agama yaitu Sunni dan Syiah. Kekerasan bermula dari konflik keluarga yang bergulir secara terus menerus dan tidak terjadi penyelesaian.

Pemilihan kata “kekerasan” ditampilkan sebagai sebuah partisipan. Partisipan berita keempat tidak menampilkan warga Sunni

sebagai pelaku dalam kasus penyerangan ini. Berita keempat hanya menampilkan warga Syiah sebagai Korban dalam kekerasan.

**b. Representasi dalam kombinasi anak kalimat**

Penggabungan kalimat satu dengan kalimat lain guna menjadi sebuah informasi menggunakan kata hubung. Kata hubung mempunyai fungsi sebagai penjelas, memperpanjang dan mempertinggi. Dalam berita keempat, menggunakan kata hubung “sementara itu” dalam menggabungkan fakta berita pertama dengan fakta berita kedua.

Berita pertama menjelaskan kekerasan yang terjadi di Sampang yang melibatkan warga Sunni dan Syiah menjadi perhatian pihak internasional. Kasus kekerasan ini akan dibahas oleh dewan HAM internasional. Terdapat juga himbauan bagi para pemimpin agama untuk berperan aktif dalam kerukunan agama. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungannya.

### **Persoalan Keluarga**

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali kembali menegaskan bahwa peristiwa bentrokan di Sampang, Madura sama sekali bukan persoalan perbedaan paham agama, antara Sunni dan Syiah. Peristiwa ini sebenarnya hanyalah perselisihan antara dua keluarga yaitu keluarga Tajul Muluk dan keluarga Rois. Perselisihan itu merembet sampai melibatkan para pengikutnya.

Kata hubung “sementara itu” digunakan untuk menjelaskan hubungan fakta kedua yang bertentangan dengan fakta pertama. Kata hubung ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan fakta yang saling bertentangan dalam waktu yang sama.

Berita kedua menerangkan akar permalahan yang terjadi dalam kasus di Sampang. Menurut Suryadharma Ali selaku Menteri Agama memaparkan bahwa peristiwa ini sebenarnya merupakan perselisihan dua keluarga.

Dalam berita keempat juga ditemukan kembali kata penghubung “sementara itu”. Kata penghubung ini menjelaskan pendapat presiden SBY yang menyayangkan lemahnya intelijen Negara dalam menanggapi keadaan semacam ini. Kelemahan intelijen ini akan membahayakan Negara dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik pembangunan.



**c. Representasi dalam rangkaian anak kalimat**

Berita keempat menampilkan partisipan sebagai orang yang memberikan reaksi dalam menanggapi kasus yang terjadi di Sampang. Reaksi pertama dikemukakan oleh Ketua Komisi Nasional HAM Ifdhal Kasim. Menurutnya kasus tersebut telah menjadi perhatian internasional. Wartawan menampilkan pendapat partisipan ini dengan cara meringkas dan mengutip langsung. Pengutipan langsung digunakan untuk mempertegas pendapat partisipan.

**”Dewan HAM internasional juga akan menagih keseriusan pemerintah dalam hal kebebasan beragama,” katanya di Jakarta, Selasa (28/8) kemarin.**

Berita ini menampilkan pendapat Dewan HAM internasional tentang keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal kebebasan beragama. Dalam Undang – Undang Dasar 45 di Negara Indonesia telah diatur kebebasan beragama. Namun dalam kasus ini terjadi diskriminasi terhadap warga Syiah. Warga Syiah selaku kaum minoritas di Sampang dianggap menyimpang dan mengganggu warga Sunni. Diskriminasi tersebut berujung pada penyerangan warga Sunni sebagai kelompok mayoritas terhadap warga Syiah sehingga menimbulkan korban.

Di sisi lain, presiden SBY juga menanggapi dan berpendapat tentang lemahnya intelijen Negara. Wartawan mengutip langsung pendapat anggota Komisi I DPR Tjahjo dalam menanggapi pernyataan presiden tentang lemahnya intelijen Negara.

**“Kalau sampai sinyalemen yang disampaikan Presiden tersebut benar, maka kondisinya sudah dalam posisi yang membahayakan pemerintahan,” kata anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo. Lemahnya intelijen tentu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik pembangunan. Hal itu juga akan mengakibatkan keresahan dan menimbulkan dampak pada masyarakat.**

Dewan Wakil Rakyat ini prihatin terhadap kondisi Negara yang berbahaya. Dia menyayangkan bahwa pihak intelijen Negara sering kecolongan dan kurang koordinasi. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Strategi wartawan dalam mengutip secara langsung pendapat Tjahjo Kumolo guna menggiring masyarakat agar lebih tahu tentang keadaan intelijen Negara. Hal ini supaya masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan keamanan diri dan lingkungan masing – masing.

#### **d. Relasi**

Kasus Sampang yang melibatkan kelompok Sunni dan Syiah dalam penyerangan dan pembakaran pemukiman warga Syiah ini merupakan pelanggaran HAM. Terlebih di Negara Indonesia telah

menjamin kebebasan dalam beragama. Maka dalam kasus ini, Komnas HAM ikut berpartisipasi dalam penyelesaian kasus.

Komnas HAM merupakan sebuah organisasi yang menangani urusan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM yaitu untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu Komnas HAM juga bertugas meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Media massa menampilkan pendapat ketua Komnas HAM guna menampilkan keterkaitan kasus tersebut dengan pelanggaran HAM. Media bertujuan agar pihak pemerintah dan masyarakat lebih peka terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Hal ini disebabkan lemahnya perlindungan HAM di Indonesia. Sebelumnya telah banyak kasus – kasus serupa yang terjadi, namun pemerintah kurang peka dalam menanggapi kasus tersebut.

Komnas HAM dianggap sebagai partisipan publik yang peduli dan perhatian terhadap hak mendasar setiap manusia. Maka dari itu pendapat yang dikemukakan oleh pihak Komnas HAM dianggap

penting dalam menunjang pemberitaan yang berkaitan dengan Kasus Sampang.

**e. Identitas**

Berita keempat yang berjudul “Dewan HAM akan Bahas Kekerasan Sampang” terdiri dari dua bagian. Pertama, berita berisi partisipasi Komnas HAM dalam menanggapi kasus yang terjadi di Sampang Madura. Dalam bagian pertama ini, wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai pihak Komnas HAM yang prihatin terhadap kasus kekerasan tersebut. Menurutnya kasus tersebut menjadi perhatian dan akan dibahas oleh dewan HAM internasional.

Wartawan juga mengidentifikasi dirinya sebagai ketua Komnas HAM yang menghimbau masyarakat agar berperan aktif dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Masyarakat juga diminta agar tidak terpancing informasi yang menyesatkan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Kedua, bagian berita yang menjelaskan tentang akar masalah kasus yang melibatkan kelompok Sunni dan Syiah ini. Kali ini wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai anggota pemerintahan dalam menanggapi kasus tersebut. Pihak pemerintah menerangkan bahwa kasus tersebut sebenarnya adalah kasus keluarga yang merembet kedalam isu SARA. Pemerintah yang diwakili Menteri Agama menghimbau agar masyarakat memahami hal tersebut.

Selain menerangkan tentang akar masalah bentrokan yang terjadi di Sampang Madura. Wartawan juga menerangkan lemahnya pihak intelijen Negara dalam menangani sebuah kasus. Lemahnya intelijen Negara ini akan merimbas pada kondisi Negara menjadi berbahaya. Hal ini juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik pembangunan.

### 3.2.1.5 Hari Kamis, 30 Agustus 2012 halaman 2, dengan Judul berita :

#### “Kasus Sampang Terlalu Disederhanakan”

**SOLO** - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin menilai kasus di Sampang jangan disederhanakan pada masalah keluarga saja. Ada perselisihan yang menyangkut ideologi dan teologi aliran antara Sunni dan Syiah.

Aksi kekerasan pun terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus. Din menengarai konflik di Sampang termasuk serangan yang masif, sehingga tidak mungkin terjadi lantaran masalah keluarga lagi.

"Masalah ini terjadi hingga sekarang karena absennya pemerintah, sekaligus inefektif dan disfungsi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada," tegasnya ketika ditemui selepas memberikan tausiah kepada ribuan mahasiswa baru di halaman GOR Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (29/8).

Dia mengemukakan, faktor ketidakhadiran pemerintah dalam menyelesaikan itulah yang menyebabkan masalah di Sampang kembali terulang setelah tercetus pertama pada 2006 dan Desember 2011. Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan keamanan, harus bisa mengambil langkah-langkah yang tegas. Menurutnya pelaku tindak kekerasan harus ditindak secara tegas sehingga ada efek jera.

Din mengatakan, rekonsiliasi kepada masyarakat seharusnya telah dilakukan sejak dulu. "Terutama pasca-Desember lalu dengan mengedepankan dialog," ujarnya.

Kedua, masyarakat menurutnya tidak siap hidup damai di negara ini sehingga intoleransi semakin kuat. Adapun faktor yang ketiga menurutnya karena adanya faktor politis lain. "Ada rekayasa serangan seperti itu karena tidak mungkin terjadi spontan. Meski demikian faktor ketiga ini tidak terlalu dominan," katanya.

#### **Negara Tegas**

Dijelaskan, peran pemerintah dan ulama yang kurang itulah yang membuat masyarakat menjadi intoleran. Jika

negara tegas maka intoleransi akar terkekang. Pemerintah menurutnya tidak hanya berpidato menyampaikar imbauan dan perintah saja, namun juga tindakan nyatanya.

"Seperti kemarin itu peran intelijer kurang, dan akhirnya negara lari dar kesalahan," katanya. Menurutnya, ulama juga harus menjadi pereka'umat, bukan lantas saling mencap sesat

Terpisah, Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan berharap ada langkah perbaikan mendasar di jajaran institusi yang mengoperasikan kegiatan intelijen, utamanya kepolisian serta Badan Inteljier Negara (BIN).

"Evaluasi sepenuhnya menjadi hak Presiden SBY termasuk mengupayakan apakah diperlukan restrukturisasi atau pergantian elitennya," katanya di Jakarta.

Sementara itu, Mabes Polri tengah mengevaluasi pengamanan di wilayah-wilayah yang rawan konflik seperti di Sampang. Polri membantah telah kecolongan atas peristiwa kerusuhan yang menewaskan dua orang di Sampang tersebut.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Agus Rianto mengungkapkan, tidak berhasil mencegah kerusuhan itu meletus dengan alasan keterbatasan personel di lapangan dibandingkan dengan massa yang terlibat kerusuhan.

"Karena personel tidak sebanding, kami tidak bisa optimal melakukan pencegahan. Kecolongan tidak, masyarakat tidak menghargai hukum, kami (Kapolsek Omben, AKP Aris Dwi) juga menjadi korban," ujarnya. (G18,di,K24-25,77)

Adapun analisis teks berita kelima terkait pemberitaan kasus di Sampang, sebagai berikut :

**a. Representasi dalam anak kalimat**

Berita ketiga yang berjudul “Kasus Sampang Terlalu Disederhanakan” adalah sebuah berita yang menanggapi berita sebelumnya. Dalam pemberitaan sebelumnya Menteri Agama mengemukakan bahwa kasus tersebut hanyalah konflik antar keluarga. Namun dalam berita kelima ini, menghimbau agar tidak menyederhanakan kasus di Sampang pada masalah keluarga saja.

**SOLO** - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin menilai kasus di Sampang jangan disederhanakan pada masalah keluarga saja. Ada perselisihan yang menyangkut ideologi dan teologi aliran antara Sunni dan Syiah.

Dari berita diatas, wartawan menggunakan kosakata “perselisihan” dalam menggambarkan kasus di Sampang Madura. Perselisihan ini terdiri dari kelompok Sunni dan Syiah yang berada di daerah tersebut. Perselisihan merupakan sebuah tindakan saling beda pendapat dimana didalamnya terdapat sebuah pertentangan antara satu sama lain.

Penggunaan kata “perselisihan” dalam berita ini, menerangkan adanya perbedaan pendapat yang menyangkut ideologi dan teologi

aliran Sunni dan Syiah. Pemakaian kata “perselisihan” menampilkan dua aktor atau lebih yang mengalami perbedaan pendapat. Kata Perselisihan tidak dapat dipakai dalam menggambarkan sebuah kejadian yang hanya melibatkan satu orang atau kelompok.

Perselisihan yang terjadi antara aliran Sunni dan Syiah di Sampang Madura, berujung pada aksi kekerasan. Aksi kekerasan meletus disebabkan tidak adanya penyelesaian dari masing – masing pihak. Golongan Sunni dan Syiah sama – sama bersikeras dalam mempertahankan pendapat. Aksi kekerasan ini terjadi juga dikarenakan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus yang sebelumnya pernah terjadi.

#### **b. Representasi dalam kombinasi anak kalimat**

Antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dapat digabung sehingga dapat membentuk suatu pengertian yang dapat dimaknai. Realitas terbentuk dengan gabungan antara kalimat dengan kalimat yang lain.

**Din menengarai konflik di Sampang termasuk serangan yang masif, sehingga tidak mungkin terjadi lantaran masalah keluarga lagi.**

Berita diatas, menerangkan tentang konflik di Sampang tidak hanya merupakan masalah keluarga saja. Penggabungan dua fakta yang berbeda, kata hubung “sehingga” dipilih untuk menegaskan

kalimat pertama. Kata hubung “sehingga” menjelaskan sebab akibat yang saling berhubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain.

Dalam berita diatas, kalimat pertama menjelaskan tentang konflik di Sampang merupakan sebuah serangan yang masif. Dikatakan masif karena salah satu pihak yaitu warga Syiah diserang dan tidak melakukan perlawanan yang berarti. Konjungsi “sehingga” menegaskan bahwa dalam peristiwa tersebut terdapat sebuah perselisihan yang mendasar dan bukan hanya merupakan permasalahan keluarga.

**Dijelaskan, peran pemerintah dan ulama yang kurang itulah yang membuat masyarakat menjadi intoleran. Jika**

Dalam paragraf diatas, konjungsi “dijelaskan” digunakan untuk memperpanjang berita pertama. Dalam berita pertama menjelaskan pemerintah yang tidak hadir sehingga mengakibatkan Kasus Sampang terulang kembali. Dalam berita kedua menggunakan konjungsi “dijelaskan” untuk menjelaskan lebih dalam tentang peran pemerintah yang harus bertindak tegas.

**Sementara itu, Mabes Polri tengah mengevaluasi pengamanan di wilayah-wilayah yang rawan konflik seperti di Sampang. Polri membantah telah kecolongan atas peristiwa kerusuhan yang menewaskan dua orang di Sampang tersebut.**



Konjungsi “sementara itu”, digunakan untuk menjelaskan suatu fakta yang berbeda namun mempunyai satu hubungan. Dalam berita ini, konjungsi “sementara itu” menerangkan bantahan Mabes Polri telah kecolongan dalam peristiwa di Sampang. Selain konjungsi “sementara itu”, wartawan juga menggunakan konjungsi “terpisah”, dalam menampilkan pemberitaan kasus ini. Konjungsi “terpisah” dan “sementara itu” mempunyai fungsi yang sama yaitu menjelaskan suatu fakta yang berbeda namun mempunyai satu hubungan. Biasanya konjungsi “terpisah” menerangkan keterangan waktu dan tempat yang berbeda.

**c. Representasi dalam rangkaian anak kalimat**

Representasi dalam anak kalimat berhubungan dengan bagian mana dalam kalimat yang lebih menonjol dibandingkan dengan bagian yang lain. Dalam berita kelima yang berjudul “Kasus Sampang Terlalu Disederhanakan” menampilkan partisipan sebagai pihak yang memberikan reaksi dalam teks berita. Berita ini, menampilkan pendapat Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Paragraf pertama berita ini, menampilkan pendapat Din Syamsuddin dalam mengungkap kasus di Sampang bukanlah sekedar konflik keluarga. Wartawan menampilkan pendapat tersebut dengan meringkas inti yang disampaikan. Wartawan juga menulis pendapat

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan mengutip langsung apa yang disampaikan.

"Masalah ini terjadi hingga sekarang karena absennya pemerintah, sekaligus inefektif dan disfungsi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada," tegasnya ketika ditemui selepas memberikan tausiah kepada ribuan mahasiswa baru di halaman GOR Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (29/8).

Biasanya, wartawan mengutip secara langsung apa yang disampaikan oleh narasumber dikarenakan menyukai pendapat yang disampaikan. Berita di atas memaparkan tentang absennya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Sampang. Pemilihan pengutipan secara langsung ini lebih menekankan bagian kalimat yang lebih menonjol dibandingkan dengan kalimat yang lain.

Din mengatakan, rekonsiliasi kepada masyarakat seharusnya telah dilakukan sejak dulu. "Terutama pasca-Desember lalu dengan mengedepankan dialog," ujarnya.

Paragraf di atas memperlihatkan bagaimana wartawan menampilkan pendapat partisipan. Dalam kalimat pertama, pernyataan Din Syamsuddin hanya ditampilkan intinya saja. Sedangkan dalam kalimat kedua, wartawan mengutip langsung apa yang disampaikan oleh Din Syamsuddin.

Selain menampilkan pendapat Din Syamsuddin, berita ini juga menampilkan partisipan lain. Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang – Merauke Circle (SMC) juga menanggapi kasus ini.

**Terpisah, Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan berharap ada langkah perbaikan mendasar di jajaran institusi yang mengoperasikan kegiatan intelijen, utamanya kepolisian serta Badan Intelejer Negara (BIN).**

Seperti halnya dengan pendapat Din Syamsuddin, wartawan juga menampilkan pendapat Syahganda Nainggolan dengan meringkas inti dari yang disampaikan dan juga mengutipnya secara langsung.

#### **d. Relasi**

Dalam berita kelima ini, media menampilkan partisipan dalam media yaitu partisipan publik. Setidaknya terdapat lebih dari tiga partisipan publik yang berpendapat dalam berita kelima ini. Partisipan publik dalam berita ini memasukkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang – Merauke Circle dan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri.

Seperti yang telah diuraikan pada analisis sebelumnya, media mempunyai hubungan dengan pihak – pihak di luar media. Hubungan

media dengan pihak – pihak lain merupakan sebuah hubungan yang saling terkait bahkan saling menguntungkan. Dalam berita kelima ini menampilkan pendapat Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Pemimpin Pusat Muhammadiyah yang secara tidak langsung menyalahkan pihak pemerintah dalam menanggapi kasus – kasus yang berbau SARA. Din Syamsuddin berpendapat mewakili warga Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu aliran agama Islam yang ada di Indonesia.

Selain Ketua Umum Pemimpin Pusat Muhammadiyah, media juga menampilkan pendapat Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang – Merauke Circle (SMC), Syahganda Naingolan. Syahganda Naingolan sebagai perwakilan rakyat yang peduli terhadap nasib bangsa Indonesia, menghimbau kepada pemerintah untuk memperbaiki institusi yang mengoperasikan kegiatan intelijen.

**e. Identitas**

Kali ini penulis akan menganalisis bagaimana wartawan menampilkan dirinya dalam sebuah berita. Apakah wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari khalayak ataukah menampilkan dirinya sebagai dirinya secara mandiri.

**Dia mengemukakan, faktor ketidakhadiran pemerintah dalam menyelesaikan itulah yang menyebabkan masalah di Sampang kembali terulang setelah tercetus pertama pada 2006 dan Desember 2011. Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan keamanan, harus bisa mengambil langkah-langkah yang tegas. Menurutnya pelaku tindak kekerasan harus ditindak secara tegas sehingga ada efek jera.**

Dalam berita diatas, wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari khalayak atau partisipan. Wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai Prof. Dr. M. Din Syamsudin dalam menampilkan pendapat. Wartawan meringkas inti dari yang dibicarakan oleh Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dalam teks berita diatas, wartawan mengungkapkan bahwa pemerintah juga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik. Pemerintah kurang tegas dalam menanggapi kasus yang pernah terjadi pada tahun 2011. Selanjutnya, wartawan juga menegaskan bahwa para pelaku kasus tindak kekerasan harus ditindak secara tegas.

**Sementara itu, Mabes Polri tengah mengevaluasi pengamanan di wilayah-wilayah yang rawan konflik seperti di Sampang. Polri membantah telah kecolongan atas peristiwa kerusuhan yang menewaskan dua orang di Sampang tersebut.**

Bagian akhir dalam berita kelima ini juga memperlihatkan posisi watawan dalam mengidentifikasi dirinya. Dalam berita diatas, wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kepolisian yang tengah mengevaluasi keamanan di Sampang. Menurut pihak kepolisian, Sampang adalah daerah yang rawan konflik. Meskipun konflik kekerasan telah terjadi di Sampang, pihak kepolisian membantah telah kecolongan atas kerusakan tersebut. Pendapat itu diungkapkan oleh Wartawan dalam kalimat kedua dalam berita.

3.2.1.6 Hari Jumat, 31 Agustus 2012 halaman 2 dengan judul “100 Ulama Muda Bahas Konflik Agama”

31 Agustus 2012

# 100 Ulama Muda Bahas Konflik Agama

**Kasus Sampang Jangan Dianggap PBB**

**REMBANG** - Sekitar 100 ulama muda bertatap muka dalam Gerakan Pemuda Anshor, Kamis (30/8), menggelar pertemuan di Aula Pondok Pesantren Paudlatul Tradisi Lelaer Rembang.

Selain untuk silaturahmi, para- mendapatkan tauhid dari KH Muna juga diuraikan untuk Mawana Besar (Ma) Ma) dan KH membahas dan menguraikan s-s-su Hamid Basidlowi Lasea. Abdi terikat moral, khususnya konflik. Ghafor mengatakan, kehidupan yang mengasimilasikan jaman kali seperti dalam pertemuan ini di- agama. Konflik di Madura masih banyak bisa dihindari dengan sikap yang pada akhirnya, tetapi juga sikap dan masalah terkait konflik yang sosial" dari Keman Binaeng Pemah- Peremuan ini, kata dia, juga ran dan Keman Kesatuan PR GP mengah madan mengidentifikasi hasil Anshor KH Dr. Abdul Ghafir Mula- dalam dan dalam masalah. mmar Zahar. Dia menyebut, ada tiga yang

Sekolah International Conference for Islamic Societies (CIS) KH Hasyim Muzadi. Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (KEMENATRAN) Mawana Besar (Ma) Ma) dan KH Hamid Basidlowi Lasea. Abdi terikat moral, khususnya konflik. Ghafor mengatakan, kehidupan yang mengasimilasikan jaman kali seperti dalam pertemuan ini di- agama. Konflik di Madura masih banyak bisa dihindari dengan sikap yang pada akhirnya, tetapi juga sikap dan masalah terkait konflik yang sosial" dari Keman Binaeng Pemah- Peremuan ini, kata dia, juga ran dan Keman Kesatuan PR GP mengah madan mengidentifikasi hasil Anshor KH Dr. Abdul Ghafir Mula- dalam dan dalam masalah. mmar Zahar. Dia menyebut, ada tiga yang

Sampang adalah daerah yang rawan konflik. Meskipun konflik kekerasan telah terjadi di Sampang, pihak kepolisian membantah telah kecolongan atas kerusakan tersebut. Pendapat itu diungkapkan oleh Wartawan dalam kalimat kedua dalam berita.

3.2.1.7 Hari Minggu, 2 September 2012 halaman 1 bersambung  
 halaman 11 dengan judul “70 Pengikut Syiah Sampang Belum  
 Ditemukan”

2 September 2012

## 70 Pengikut Syiah Sampang Belum Ditemukan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nur Kholis menyatakan, pihaknya terus menelusuri informasi tentang 70 orang penganut Syiah yang menjadi korban kekerasan di Sampang dan hingga kini belum ditemukan.

“Kami baru dapat informasi dari KontraS Surabaya bahwa ada yang belum kembali. Kami akan verifikasi data itu dengan mengasakan dua komisioner ke sana,” kata Nur Kholis, di Jakarta, Sabtu (1/9).  
 Bentrok terjadi Minggu (26/8) lalu ketika pe-

nganut Syiah di Karanggayam, Kabupaten Sampang, Madura, diserang oleh kelompok Sunni.

Dalam bentrokan itu, puluhan rumah warga Syiah dibakar. Seorang pengikut mereka dilaporkan meninggal setelah diangkut massa, sementara puluhan lain luka-luka terkena senjata tajam. Untuk menghindari jatuhnya korban jiwa lebih banyak, puluhan warga desa itu memilih mengungsi ke tempat lebih aman.

Nur Kholis menegaskan, 70 penganut Syiah di Sampang belum bisa dikatakan hilang.

(Bersambung hlm 11 kol 1)



**MULAI SEKOLAH.** Siswa kedua bersekolah di SD Karangayam (1/9). Dari 278 siswa, yang lainnya masih mengungsi. (30)

## 2 September 2012

### 70 Pengikut....

(Sambungan hlm 1)

Merdeka lebih tepat disebut belum kembali.

"Keterangan Kontras belum dilakukan verifikasi, terutama kepada keluarga. Itu salah satu poin juga yang akan dilakukan Komnas HAM. Kami akan pastikan keluarga ini selamat," ujar Nur Kholis.

Dia justru mengkhawatirkan kondisi pengungsi Syiah karena pemerintah daerah hanya memberikan waktu sepuluh hari penyediaan sarana dan prasarana pengungsian. Nur Kholis menyayangkan Pemkab Sampang yang tidak memberikan waktu sampai pengungsi mampu mandiri kembali.

Relokasi pengungsi pun harus dilakukan untuk seluruh

sa relokasi karena perbedaan (agama). Keuali kalau kelompok itu memang menginginkan relokasi," tegas Nur Kholis.

Terpisah, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi menilai, penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang serta Cikeusik, lebih disebabkan oleh aparat Polri yang kurang responsif. Bila polisi responsif, orang Madura tidak akan melakukan tindakan kekerasan itu.

"Orang Madura itu paling takut sama ulama dan polisi. Kalau polisi responsif dan menegakan, tidak akan terjadi kekerasan di Sampang. Sayangnya, saat kejadian berlangsung, ada laporan mengatakan polisi malah duduk-duduk saja," ujar Zuhairi dalam dialog "Politik" bertema "Kekerasan dan Komnas HAM" di Warung Daun Cikini, Jakarta, kemarin.

sehingga lebih responsif dan bisa mencegah terjadinya konflik serupa.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan bahwa polisi dan Badan Intelijen Negara (BIN) harus segera memetakan wilayah-wilayah di Indonesia dan potensi kekerasan yang bisa timbul di wilayah tersebut.

"Ini langkah antisipasi, langkah preventif. Selain itu polisi dan intelijen harus segera melakukan konsolidasi untuk mendapatkan data akurat," kata Didi.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Ijen Anang Iskandar, menegaskan, walaupun akar permasalahan dari konflik yang terjadi di Sampang karena persoalan keluarga, konflik itu tak berdiri sendiri.

"Memang akarnya persoalan keluarga tapi tadi tidak berarti

kesempatan yang sama.

Menurut dia, kini Polri terus melakukan pendalaman kasus untuk mengetahui motif di balik oknum penyerobot itu, sehingga berujung pada konflik antar penganut agama di Sampang.

Zuhairi mengkritik hal tersebut. Menurut dia hal itu adalah ketidakjujuran pemerintah. Ini, menurut dia, terlihat jelas seperti dari pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali beberapa waktu lalu yang juga menyebut bahwa ini adalah konflik yang berakar dari persoalan keluarga.

"Kalau mau jujur, maka sebenarnya potensi konflik mazhab ini sudah terdeteksi sejak satu setengah tahun lalu. Jangan disejahtakan ini masalah keluarga saja. Saya melihat ada situasi yang berbeda dari apa yang biasanya. Tapi menomona tidak seperti dicegah



4 September 2012

## Penyelesaian Kasus Syiah Diharapkan Permanen

JAKARTA - Kasus bentrok kelompok Sunni dan Syiah di Sampang, Madura bisa terulang karena tidak ada penyelesaian yang bersifat permanen.

Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap kasus Sampang bisa diselesaikan dalam waktu dekat dengan penyelesaian yang tuntas.

"Penyelesaiannya harus permanen, bukan temporer," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Antaragama Slamet Effendy Yusuf dalam konferensi pers penutupan Rakernas MUI di Astrana Haji Pondok Gede, kemarin.

Menurutnya, yang paling penting dan harus diingat pemerintah adalah penyelesaian harus selaras agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Bila ada yang dirugikan, maka berarti masih ada poten-

si bentrok lagi," tambahnya.

Dikatakannya, pemicu kasus Sampang tidak sederhana yang sesederhana yang diungkapkan pemerintah, yakni persoalan keluar-ga.

Kasus tersebut lebih kompleks karena menyertakan permasalahan sekte dalam agama Islam, yaitu Syiah dan Sunni.

"MUI menilai kasus Sampang tidak sederhana yang diungkapkan pemerintah. Memang kasus ini terjadi karena masalah keluarga, tapi tidak semata-mata demkian, karena ada provokasi lebih lanjut dari berbagai pihak yang mengartikan



**Slamet Effendy Yusuf**

Si/Dok

"MUI menilai kasus Sampang tidak sederhana yang diungkapkan pemerintah. Memang kasus ini terjadi karena masalah keluarga, tapi tidak semata-mata demkian, karena ada provokasi lebih lanjut dari berbagai pihak yang mengartikan

masalah ke-perpang pada 2011, MUI telah soalani Syiah mengirim tim ke kabupaten dan Sunni," ujarnya.

**Waspada**

Slamet menjelaskan, MUI sudah mewaspadai ajaran Syiah di Sampang sejak jauh-jauh hari.

Si/Dok

Tahun 1984 MUI mengeluarkan fatwa bah- arkan fatwa bah- wa aliran Syiah harus diwaspadai.

Sebelum pecah kerusuhan warga Syiah-Sunni di Sampang, tandas maritan ketua umum GP Anshor tersebut. (F4-25)

**DIJUAL SEMENTARA RUMAH HM**

Luas Bangunan : 230 m2, Luas Tanah : 704 m2

Lokasi : Telaga Bodas Raya No. 14 Semarang

Hubungi : 0811290035

3.2.1.7 Hari Selasa, 4 September 2012 halaman 2 dengan judul :

“Penyelesaian Kasus Sampang Syiah Diharapkan Permanen”

3.2.1.8 Hari Sabtu, 8 September 2012 halaman 2 dengan judul : “Tajul Muluk Tolak Relokasi”



### 3.2.2 Discourse Practice

Analisis *discourse practice* memusatkan perhatian pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk lewat suatu praktik diskursus, yang akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Teks berita melibatkan praktik diskursus yang rumit dan kompleks. Praktik wacana ini yang menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Hal ini berlaku dalam sebuah media sebagai tempat produksi berita.

Ada tiga aspek penting untuk melihat bagaimana teks tersebut diproduksi dan dikonsumsi. *Pertama*, dari sisi wartawan itu sendiri.

*Kedua*, dari sisi bagaimana hubungan antara wartawan dengan struktur organisasi media. *Ketiga*, praktik kerja atau rutinitas kerja dari produksi berita mulai dari pencarian berita, penulisan, editing sampai muncul sebagai tulisan di media. Ketiga elemen tersebut merupakan keseluruhan dari praktik wacana dalam suatu media yang saling kait dalam memproduksi suatu wacana berita.

Faktor pertama dari pembentukan individu dan profesi jurnalis itu sendiri. Faktor ini berhubungan dan berkaitan dengan para profesional. Kali ini, penulis memilih Harian Suara Merdeka sebagai objek dalam penelitian. Harian Suara Merdeka merupakan Koran terbesar di Jawa Tengah. Ada 170 orang wartawan yang menjadi jurnalis dalam Harian Suara Merdeka. Total 170 orang ini terdiri dari 160 laki – laki dan 10 orang perempuan. Kebanyakan wartawan ini berasal dari berbagai disiplin ilmu. Diantaranya jurusan kedokteran, ekonomi, perbankan dan komunikasi. Hanya ada sedikit wartawan Suara Merdeka yang berpendidikan khusus dalam bidang jurnalistik. Syarat minimal pendidikan wartawan Suara Merdeka adalah berpendidikan S1.

“Anak dari fakultas hukum, nanti akan diarahkan meliput ke pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Semua wartawan kami arahkan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari. Wartawan disini yang berpendidikan khusus jurnalistik hanya sedikit. Karena kami ingin

terspesialisasi dalam bidang – bidang berita”, kata Eko Hari selaku sekretaris redaksi harian Suara Merdeka (Wawancara di kantor Redaksi Harian Suara Merdeka pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 12.10 WIB).

Wartawan yang berpendidikan kedokteran akan ditempatkan dalam liputan berita yang terkait dalam bidang kesehatan. Sedangkan liputan berita bagian umum akan diserahkan kepada wartawan yang berpendidikan jurusan komunikasi.

Dengan latar belakang pendidikan bukan jurnalis. Harian Suara Merdeka memberikan pelatihan jurnalistik kepada para calon wartawan yang telah direkrut selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, calon wartawan akan dididik dalam kelas jurnalistik dan tidak boleh meninggalkan kelas hingga selesai. Setelah pendidikan jurnalistik selesai, calon wartawan Suara Merdeka akan diuji di lapangan selama 9 bulan. Dalam 9 bulan, kinerja calon wartawan akan dipantau apakah layak menjadi wartawan Harian Suara Merdeka atau tidak. Total satu tahun masa pendidikan menjadi Wartawan Suara Merdeka.

Perbedaan pendidikan mempengaruhi kinerja seorang wartawan. Wartawan yang berpendidikan di Universitas dengan kualitas baik, akan mencetak SDM yang bagus begitu juga sebaliknya. Hal ini terlihat dari tulisan – tulisan yang dihasilkan dari seorang wartawan. Seluruh wartawan Suara Merdeka diwajibkan bersikap

profesional dalam menjalankan tugasnya. Profesionalitas ini dijunjung tinggi oleh wartawan Suara Merdeka.

“Mereka harus bersifat professional. Saya selalu menekankan kepada mereka agar selalu bersikap professional dimanapun. Hal ini dikarenakan di lapangan banyak sekali orang yang mengaku sebagai seorang wartawan untuk mendapatkan uang bukan berita. Wartawan kami dididik hanya mencari berita bukan uang, karena sudah diberi perjanjian sejak awal. Apabila ada yang ketahuan meminta uang atau mendapat uang dari narasumber, wartawan tersebut akan langsung dikeluarkan. Ini untuk menjaga sikap independen Suara Merdeka”, ujar Eko Hari selaku salah satu pelatih Diklat pendidikan Jurnalistik di Suara Merdeka (Wawancara di kantor Redaksi Harian Suara Merdeka pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 12.10 WIB).

Selain wajib bersikap professional, wartawan Suara Merdeka harus bersifat independen. Wartawan Suara Merdeka tidak diperbolehkan terjun dalam dunia politik. Jika ada yang ketahuan terjun dalam dunia politik, akan dikeluarkan dari Suara Merdeka. Wartawan Suara Merdeka hanya diperbolehkan memberikan hak suaranya dalam partisipasi pemilu.

Hubungan sosialisasi antara wartawan Suara Merdeka dengan wartawan lain sangat baik. Tidak ada permasalahan yang menjadikan sebuah konflik. Antar wartawan biasanya melakukan tukar menukar

berita. Suara Merdeka mempunyai grup wartawan yang berada di Jawa Tengah. Di lapangan, wartawan Suara Merdeka bekerja sama dalam peliputan berita.

Dalam Suara Merdeka pola pengambilan keputusan terkait berita apa yang akan diliput esok pagi dengan menggunakan mekanisme rapat malam. Rapat malam di mulai pada jam delapan malam. Rapat ini hanya dihadiri oleh para kepala bagian dan tidak melibatkan wartawan. Rapat malam, menentukan hasil liputan berita apa yang akan dimuat esok pagi. Keesokan harinya, Suara Merdeka kembali mengadakan rapat pagi guna evaluasi Koran yang terbit hari itu. Rapat pagi dilakukan pada jam sembilan sampai dengan jam sepuluh pagi.

“*Headline* berita ditentukan ketika rapat malam melalui mekanisme rapat kecil yang terdiri dari beberapa kepala bagian. Mana berita yang akan dimuat, tidak dimuat dan ditulis ulang ditentukan ketika rapat malam”, kata Eko Hari (Wawancara di kantor Redaksi Harian Suara Merdeka pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 12.10 WIB).

Wartawan tidak diikut sertakan dalam rapat redaksi. Wartawan Suara Merdeka terbagi dalam biro – biro. Biro – biro tersebut terdiri dari Biro Jakarta, Biro Surakarta, Biro Banyumas, Biro Pantura, Biro Muria, Biro Kedu/DIY, Biro Bandung. Setiap biro melakukan rapat pagi sebelum penugasan peliputan. Kepala biro terkadang

mendapatkan arahan dari kepala bagian. Hal ini terkait dengan penugasan peliputan berita.

Dalam pemberitaan Kasus Sampang, Suara Merdeka menugaskan wartawan yang bertugas di Surabaya dan Malang. Suara Merdeka tidak mengirim wartawan dari daerah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan kasus di Sampang adalah sebuah berita yang terkait sebuah peristiwa yang tidak diduga, sehingga harus cepat dalam peliputan. Maka dari itu, Suara Merdeka menugaskan wartawan yang dekat dengan daerah Madura. Wartawan Suara Merdeka melakukan liputan langsung dalam pemberitaan Kasus Sampang.

“Yang meliput Kasus Sampang adalah wartawan dari Surabaya dan Malang. Kami mempunyai wartawan yang menetap disana. Jika menugaskan wartawan dari sini akan terlalu jauh karena ini merupakan kasus yang harus cepat diliput. Kami menugaskan Ainur Rakhim dan Wiharjono untuk meliput di Sampang selama beberapa hari”, ungkap Eko Hari (Wawancara di kantor Redaksi Harian Suara Merdeka pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 12.10 WIB).

Peliputan guna memperoleh informasi dan data – data terkait Kasus Sampang, dipermudah oleh pemerintah Jawa Timur. Sekarang, sudah ada Undang – Undang yang mengatur tentang kebebasan informasi. Jadi semua pihak wajib terbuka dalam memberikan informasi. Sebelum berita diterbitkan, berita harus melalui proses

editing. Proses editing ini yang akan memperhalus berita, yang diharapkan tidak ada yang dirugikan dalam sebuah pemberitaan.

“Editor harus memperhatikan apakah kasus ini terkait unsure atau tidak. Jangan sampai memihak Sunni atau Syiah. Karena editing berita yang paling berperan dalam keberimbangan sebuah berita. Editor harus berimbang dan tidak menyudutkan salah satu pihak”, tegas Eko Hari (Wawancara di kantor Redaksi Harian Suara Merdeka pada tanggal 27 Mei 2013 pukul 12.10 WIB).

Terkait Kasus Sampang, editor berita harus bersifat netral dalam penulisan pemberitaan. Kasus Sampang yang berbau SARA yang melibatkan Sunni dan Syiah. Dalam berita jangan sampai lebih condong ke salah satu pihak. Editing harus bersikap adil dan berimbang dalam pemberitaan. Hal ini terkait dengan prinsip jurnalis yang harus bersifat independen.

### **3.2.3 Sociocultural Practice**

#### **3.2.3.1 Situasional**

Teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas, unik sehingga satu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Kalau wacana dipahami sebagai sebuah tindakan, maka tindakan itu sesungguhnya adalah upaya untuk merespons situasi atau konteks sosial tertentu.



Kasus penyerangan yang terjadi di Sampang Madura antara aliran Sunni dan Syiah meletus pada momen lebaran. Lebaran yang seharusnya sebagai momen untuk saling memaafkan ternoda dengan aksi penyerangan dan pembakaran rumah warga Syiah. Penyerangan ini diduga dikarenakan kekesalan warga Sunni di Sampang. Warga Sunni di Sampang merasa gerah dengan warga Syiah yang menurut mereka menyimpang dari agama Islam.

Sebelum penyerangan ini terjadi, Warga Sunni telah melakukan demo penolakan ajaran Syiah ke rumah Tajul Muluk. Mereka juga melaporkan ajaran Syiah yang diajarkan oleh Tajul Muluk ke ulama di Madura dan pemerintah setempat. Warga Sunni menuduh bahwa Tajul Muluk dan pengikutnya adalah sesat.

Menanggapi laporan tersebut, para ulama, MUI dan pihak pemerintah mendatangi Tajul Muluk untuk mengadakan klarifikasi terhadap tuduhan – tuduhan tersebut. Karena situasi warga sunni yang semakin memanas, para ulama dan MUI memberikan perjanjian kepada Tajul Muluk dan para pengikutnya. Adapaun isi perjanjian tersebut adalah :

*Pertama*, bahwa tidak diperbolehkan lagi mengadakan ritual dan dakwah yang berkaitan dengan aliran Syiah oleh Tajul Muluk karena sudah meresahkan masyarakat.

*Kedua*, Tajul Muluk bersedia tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran aliran Syiah di kabupaten Sampang.

*Ketiga*, apabila tetap melakukan ritual dan dakwah. Tajul Muluk siap diproses secara hukum.

*Keempat*, MUI, NU, dan LSM di kabupaten Sampang akan selalu memonitor mengawasi aliran Syiah.

*Kelima*, MUI, NU, dan LSM siap untuk meredam gejolak masyarakat baik bersifat dialogis atau anarkis selama Tajul Muluk dan pengikutnya menaati kesepakatan – kesepakatan yang telah diajukan (<http://hidayatullah.com/read/245690/01/09/2012> diakses pada tanggal 15 Januari 2013 pukul 13 : 37 WIB).

Perjanjian rupanya tidak berjalan. Ajaran Syiah tetap disebarkan di Sampang. Akibatnya perpecahan dan peselisihan mulai terlihat jelas antara warga Sunni dan Syiah di Sampang. Warga Sunni kembali melaporkan hal ini terhadap pemerintah dan para ulama. Untuk meredam konflik agar tidak semakin memanas, Tajul Muluk diungsikan ke Malang dan tidak boleh mengajarkan ajaran Syiah.

Namun pada kenyataannya, setelah selang beberapa bulan. Tajul Muluk kembali ke Sampang dan kembali menyebarkan Syiah. Hal inilah yang menyulut kemarahan warga Sunni di Syiah sehingga terjadi bentrok yang memakan korban.

Konteks sosial menganalisis bagaimana teks diproduksi dalam memperhatikan situasi teks ketika diproduksi. Dalam berita pertama yang berjudul “Bentrok Warga di Sampang, Satu Tewas.” menjelaskan kronologi konflik yang terjadi. Berita pertama ini muncul sehari setelah kekerasan di Sampang terjadi.

Dalam berita pertama, menjelaskan situasi bentrokan yang berupa penyerangan serta pembakaran pemukiman warga Syiah di Sampang Madura. Aksi pembakaran ini memicu aksi bentrok antara massa Syiah dan Sunni. Dalam bentrokan antar warga ini mengakibatkan satu orang tewas, sejumlah orang terluka dan 37 rumah terbakar.

Berita pertama ini juga menjelaskan bahwa kasus bentrokan di Sampang pernah terjadi di tahun 2011. Saat itu, ratusan massa dari Sunni yang dipimpin K. H. Rois melakukan aksi pembakaran rumah, musholla dan sekolah milik tokoh Syiah Sampang, K. H. Tajul Muluk. Selain itu juga menjelaskan tentang pihak kepolisian yang yang diterjunkan ke lokasi Sampang akibat bentrok tersebut. Polisi menjaga lokasi dari pintu masuk Kecamatan Omben hingga Desa Karanggayam yang menjadi lokasi kelompok Syiah di Sampang.

Berita kedua Kasus Sampang masih menerangkan tentang kronologi kasus tersebut. Berbeda dengan berita pertama yang menerangkan keadaan ketika terjadi penyerangan. Berita kedua

menerangkan tentang dugaan bahwa Kasus Sampang bukanlah sebuah kerusuhan. Kasus tersebut dinilai sebagai sebuah penyerangan yang direncanakan secara sistemis terhadap warga Syiah.

Berita kedua ini juga sudah mulai menampilkan pendapat – pendapat tokoh masyarakat. Hendardi selaku Ketua Badan Pengurus Setara Institute menegaskan bahwa terulangnya kasus tersebut dikarenakan kekerasan terus dibiarkan tanpa penegakan hukum. Dia juga menghimbau kepada Presiden agar menyikapi Kasus Sampang sebagai kondisi darurat kebebasan beragama.

Selain itu, wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dr Asrorun Ni'am Sholeh meminta pemerintah segera menuntaskan konflik dan mengurai akar masalah. Tidak lupa, dia mengingatkan pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap anak – anak yang ikut menderita akibat insiden tersebut.

Berita ketiga, memaparkan tentang keberhasilan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku kerusuhan di Sampang. Terhitung hari keempat setelah terjadinya bentrokan, polisi telah berhasil menangkap delapan orang yang terlibat dalam bentrokan antara warga Sunni dan Syiah. Meskipun begitu, polisi masih memburu tiga orang provokator yang menyulut aksi bentrokan tersebut.

Dalam berita ketiga ini juga, pihak kepolisian menegaskan akan menindak tegas siapapun yang menjadi pelaku kasus tersebut. Gubernur

Jatim Soekarwo juga menyatakan tentang penangkapan tujuh dari delapan pelaku yang terjadi pada Minggu malam. Soekarwo membantah bahwa kasus Sampang ini bemuatan politik yang dikaitkan dengan Pilkada dan Pilgub Jawa Timur. Dia juga menegaskan bahwa tidak bisa melarang ajaran Syiah berkembang di Jatim. Namun, dia mengingatkan agar kelompok Syiah tidak membuat syiar yang menyinggung perasaan dan keyakinan kelompok lain.

Di lain tempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran meminta jajaran penegak hukum bertindak tegas dan adil dalam kasus di Sampang. Presiden juga meminta kepada para jajaran pemerintah, utamanya aparat keamanan mengambil langkah yang cepat dan tepat. Hal ini bertujuan agar kasus kekerasan terhadap umat beragama tidak terulang kembali.

Dalam berita keempat, menjelaskan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang meminta pemerintah bertindak tegas dalam kasus kekerasan. Hal ini dikarenakan kasus yang terjadi di Sampang Madura menjadi perhatian pihak internasional dan akan dibahas di sidang HAM internasional. Ifdhal Kasim, selaku ketua Komnas HAM di Indonesia menyatakan bahwa pihak internasional akan menagih keseriusan pemerintah dalam kebebasan beragama.

Tindakan pihak HAM internasional menagih keseriusan tersebut dikarenakan Undang – Undang Negara Indonesia telah mengatur

tentang kebebasan beragama. Namun, dalam masyarakat sering terjadi konflik yang melibatkan perbedaan agama. Dalam Kasus Sampang, terjadi konflik agama Islam yang berbeda aliran. Aliran keagamaan ini yaitu antara Sunni dan Syiah.

Disisi lain, Menteri Agama, Suryadharma Ali menegaskan bahwa kasus ini bukanlah murni kasus yang berbau SARA. Menurut Menteri Agama, kasus ini adalah perselisihan dua keluarga yaitu keluarga Tajul Muluk dan M. Rois. Warga yang berkonflik hanya memerlukan rekonsiliasi keluarga dan warga harus mengedepankan kekeluargaan dan persaudaraan.

Berita kelima menjelaskan tanggapan ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr M Din Syamsuddin. Menurut Din Syamsuddin, kasus di Sampang jangan terlalu disederhanakan pada masalah keluarga saja. Ada perselisihan yang menyangkut ideologi dan teologi antara Sunni dan Syiah.

Kasus Sampang merupakan serangan masif, sehingga tidak mungkin terjadi lantaran masalah keluarga saja. Faktor ketidakhadiran pemerintah dalam menyelesaikan kasus serupa menjadi salah satu faktor penyebab kasus ini terjadi. Pemerintah khususnya penegak hukum harus mengambil langkah – langkah tegas dalam penyelesaian kasus kekerasan yang berbau SARA.

### **3.2.3.2 Institusional**

Level institusional melihat bagaimana pengaruh institusi dalam praktik produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dari dalam media sendiri, bisa juga kekuatan – kekuatan eksternal di luar media yang menentukan proses produksi berita.

Suara Merdeka adalah surat kabar yang berada di Jawa Tengah, sirkulasi terbesarnya yaitu wilayah Jawa Tengah. Suara Merdeka mempunyai jargon “perekat komunitas Jawa Tengah” berusaha menjadi surat kabar nomer satu di Jawa Tengah. Pada penelitian kali ini, penulis memilih pemberitaan mengenai Kasus Sampang di Harian Suara Merdeka. Kasus Sampang terjadi di Madura yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur.

Suara Merdeka yang keberadaannya di Jawa Tengah, mengakibatkan peliputan kasus ini harus menugaskan wartawan Suara Merdeka yang biasanya bertugas meliput di wilayah Jawa Timur. Dalam pemberitaan kasus ini, Suara Merdeka lebih menampilkan para partisipan yang menanggapi kasus yang terjadi di Sampang.

Dalam berita pertama terkait kasus di Sampang, Suara Merdeka menampilkan pendapat GP Ansor yang merupakan salah satu organisasi aliran Sunni. Namun, GP ansor tidak mendukung aksi kekerasan yang dilakukan oleh warga Sunni terhadap warga Syiah di Sampang. Bahkan GP Ansor mengutuk tindakan tersebut.

Terlihat dari pernyataan tersebut, tidak semua warga Sunni berkonflik dengan warga Syiah. Aliran Syiah tersebar di Indonesia, namun mereka dapat hidup rukun. Tidak seperti di Sampang, warga Sunni dan Syiah berkonflik. Konflik tersebut terjadi bukan hanya disebabkan oleh teologi antara Sunni dan Syiah yang berbeda. Namun ada faktor lain yang mengakibatkan konflik ini meletus.

Level institusional yang ada dalam berita kedua menjelaskan tanggapan dari masyarakat luas. Salah satunya yaitu ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi. Hendardi menyatakan kekerasan akan terus terulang jika penegakan hukum bersifat kurang tegas.

Suryadharma Ali selaku Menteri Agama turut berkomentar dalam kasus Sampang yang melibatkan dua aliran agama Islam. Tidak ketinggalan, wakil ketua Komisi Perlindungan Anak mengingatkan kepada pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap anak – anak yang menderita akibat kasus ini.

Dalam berita ketiga, lebih memperlihatkan tanggapan dari pihak pemerintah. Pemerintah Jawa Timur yang diwakili Gubernur Soekarwo mengatakan keberhasilan kepolisian dalam menangkap pelaku benrokan tersebut. Soekarwo juga menegaskan bahwa kasus ini murni kasus kriminal bukan ada unsur politik.

Pernyataan Gubernur Jatim tersebut menanggapi isu yang sedang berhembus. Isu tersebut menyebutkan bahwa Kasus Sampang adalah



sebuah kasus yang sengaja dibuat dan dikait – kaitkan dengan isu pilkada Sampang. Selain itu, Soekarwo sebagai perwakilan pemerintah Jatim tidak sepakat dengan usul relokasi pengikut Syiah di Sampang Madura. Jika warga Syiah direlokasi, hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi warga Syiah. Secara tidak langsung, pemerintah lebih memihak kelompok Sunni.

Dalam berita keempat yang berjudul “Dewan HAM akan Bahas Kekerasan Sampang” menerangkan tentang kasus di Sampang yang termasuk dalam pelanggaran HAM. Dalam berita ini, Suara Merdeka memaparkan tentang tanggapan Komnas HAM tersebut. Menurut Komnas HAM, kasus ini telah menjadi perhatian internasional. Pihak HAM internasional juga akan menagih keseriusan pemerintah Indonesia dalam kebebasan beragama.

Mayoritas wartawan di Suara Merdeka adalah beragama Islam. Kasus di Sampang Madura ini juga melibatkan warga di Sampang yang beragama Islam namun beda aliran yaitu Sunni dan Syiah. Dalam berita kelima, Suara Merdeka menampilkan pendapat Din Syamsuddin sebagai ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menanggapi kasus tersebut.

Muhammadiyah merupakan salah satu aliran agama Islam yang berkembang di Indonesia. Jadi menurut Suara Merdeka, pendapat Din Syamsuddin dianggap penting dalam menanggapi kasus tersebut. Din

Syamsuddin dianggap sebagai perwakilan dari warga Muhammadiyah dalam menanggapi kasus antara Sunni dan Syiah.

### **3.2.3.3 Sosial**

Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. Fairclough menegaskan bahwa wacana yang muncul dalam media ditentukan oleh perubahan masyarakat. Dalam level sosial, budaya masyarakat turut menentukan perkembangan dari wacana media.

Salah satu faktor yang menyebabkan antara warga Sunni dan Syiah adalah kondisi masyarakat Madura yang keras, terkenal dengan gaya bicara yang blak-blakan dengan logat yang kental dan memiliki sifat temperamental dan mudah tersinggung. Menurut masyarakat Madura, kehormatan adalah nilai luhur yang harus dijunjung tinggi. Jika hal itu diremehkan atau direndahkan maka akan muncul rasa tersinggung yang akhirnya akan mengarah pada konflik kekerasan. Kehormatan bagi warga Madura khususnya Sampanga meliputi; harga diri, wanita, harta dan agama.

Dalam kasus di Sampang, konflik dan kekerasan timbul diakibatkan oleh masalah teologi Islam yang berbeda aliran. Di Sampang Madura terdapat dua aliran agama Islam yang berkembang. Sunni selaku aliran mayoritas menganggap Syiah selaku aliran minoritas sebagai aliran sesat. Kesesatan Syiah terbukti dengan pola beribadah

mereka yang dianggap aneh menurut warga Sunni. Selain pola beribadah, rukun Islam dan rukun Iman warga Syiah berbeda dengan Sunni. Yang lebih memperlihatkan adanya perbedaan adalah lafad adzan Syiah berbeda dengan Sunni.

Hal inilah yang menyulut amarah warga Sunni di Sampang. Orang Sampang merespon amarah dengan tindakan yang cenderung keras. Orang Sampang rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kehormatannya. Dalam kasus ini, orang Sampang mersa agamanya disesatkan oleh warga Syiah.

Selain masalah teologi agama yang mendasar antara Sunni dan Syiah. Kasus Sampang juga melibatkan konflik keluarga. Tajul Muluk selaku pemimpin Syiah adalah kakak dari M. Rois yang merupakan pemimpin Sunni di Sampang. Keduanya sudah mengalami konflik pribadi cukup lama. Hal ini juga yang menjadi pemicu konflik antar warga di Sampang.

Masyarakat Sampang mempunyai kultur kepatuhan terhadap pemimpin masyarakat. Mereka yang bersifat tidak patuh dan tidak sopan akan dianggap tidak beradab (*ta' dhapor, langka, jangghel*). Dalam skema kepatuhan, ditemukan posisi kyai yang sangat sentral dalam kehidupan sosio-religius masyarakat Madura. Bagi orang Madura, kyai merupakan jaminan masalah moralitas. Dari sini dapat dilihat bahwa

ketaatan orang Madura terhadap kyai karena filosofi hidup mereka yang sangat kuat.

Berita pertama Kasus Sampang Madura yang melibatkan aliran Sunni dan Syiah menerangkan sebuah konflik yang melibatkan isu SARA. Namun ada juga yang menyatakan bahwa kasus ini hanyalah sebuah kasus antar keluarga. Peristiwa kekerasan ini berupa pembakaran pemukiman warga Syiah. Peristiwa pembakaran ini mengakibatkan satu orang tewas.

Konflik Sunni dan Syiah merupakan sebuah konflik yang sudah ada sejak lama. Konflik ini sudah berlangsung sejak zaman khulafaurrasidin. Namun, sudah lama pula Sunni dan Syiah saling pengertian dan menghormati satu sama lain. Dalam kasus di Sampang ini, diperkirakan ada pihak – pihak yang sengaja mengadu domba sehingga menyulut kemarahan warga.

Sedangkan dalam berita kedua menjelaskan Badan Setara Institute sebagai organisasi masyarakat memberikan tanggapan mengenai kasus di Sampang sebagai sebuah kasus yang dibiarkan tanpa penegakan hukum. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 pernah terjadi kasus serupa. Ketua Badan Setara institute, Hendardi menghimbau kepada presiden agar menyikapi kekerasan ini sebagai kondisi darurat kebebasan beragama.

Ajaran – ajaran agama adalah kedamaian, tidak mengajarkan kekerasan. Perbedaan pendapat dalam beragama memang ada. Namun hal itu harus dengan jalan yang bijak dan penuh persaudaraan. Penyelesaian perbedaan bukan dengan kekerasan. Kekerasan hanyalah akan menimbulkan korban dan kebencian.

Aspek sosial dalam berita ketiga ini memaparkan tentang tanggapan pemerintah Jawa Timur dalam menanggapi kasus di Sampang Madura. Pemerintah Jatim menolak relokasi pengikut Syiah. Pemerintah Jatim yang diwakili oleh Gubernur Soekarwo mengungkapkan bahwa Indonesia adalah Negara pancasila, tidak bisa kelompok minoritas diusir begitu saja.

Selain, menanggapi tentang rencana relokasi. Dalam berita ketiga ini, dijelaskan pula tanggapan Presiden SBY tentang kasus di Sampang. Presiden menghimbau agar penegak hukum bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus tersebut. Presiden juga melakukan komunikasi dengan Gubernur Jatim via telepon. Dalam komunikasi tersebut, presiden selaku kepala Negara memerintah secara langsung kepada Gubernur agar membantu korban dan kedua belah pihak secara adil.

Aspek sosial dalam berita keempat, memperlihatkan kasus yang terjadi di Sampang merupakan sebuah pelanggaran HAM. Selain itu, dijelaskan juga pendapat menteri Agama yang seharusnya bertanggung

jawab dalam kasus tersebut. Suryadhama Ali mengutarakan bahwa kasus ini sebenarnya hanya kasus perselisihan keluarga. Bukan sebuah kasus yang melibatkan dua aliran agama Islam.

Sebagai Menteri Agama, apa yang dikatakannya dapat meredam masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu SARA tersebut. Masyarakat tidak digiring pada isu tentang perselisihan antar aliran agama Islam. Namun, perkataan Suryadhama Ali juga dapat menimbulkan spekulasi bahwa kasus ini terlalu disederhanakan. Akibatnya, kasus ini ditanggapi secara kurang tegas oleh pemerintah.

Dalam berita kelima, aspek sosial mengacu pada tanggapan Din Syamsuddin selaku ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Din Syamsuddin memaparkan bahwa pemerintah juga menjadi salah satu faktor terjadinya kasus kekerasan yang melibatkan keagamaan. Selain pemerintah, ulama juga harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Pemerintah dan ulama kurang berperan dalam kasus – kasus serupa. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi intoleran terhadap aliran yang dianggap berbeda dengannya.

Pemerintah juga harus meningkatkan intelijen yang kurang tanggap dalam menghadapi kasus – kasus yang menimbulkan kekerasan. Namun, dalam kasus ini pihak kepolisian membantah telah kecolongan atas peristiwa yang menewaskan dua orang di Sampang. Pihak

kepolisian beralih, tidak berhasil mencegah kerusuhan meletus dengan alasan keterbatasan personel di lapangan.